



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN KAB. BREBES
2023 – 2026**





DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN.....	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	7
2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan	20
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.....	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan	57
BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	60
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	60
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	61
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	63
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	66
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis	72
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	75
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan	72
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	74
BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	76
BAB VII. INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD TAHUN 2023–2026.....	106
BAB VIII. PENUTUP.	111



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasar Golongan	72
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasar Pendidikan	72
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana	21
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes 2017–2022 2017–2022	23
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes 2017 –2022	24
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes	30
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes	722
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	74
Tabel 6.1 Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 260 dimana Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementrian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya setiap perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang telah disusun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional .

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikator program dan kegiatan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam rangka penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Baperlitbangda dan pemangku kepentingan.

Penyusunan rencana strategis Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026 dilaksanakan mengacu kepada Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 dan memperhatikan keselarasan dengan Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, telaahan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup



Strategis (KLHS) serta memperhatikan faktor pendukung dan penghambat yang ada, yang merupakan hasil analisis eksternal dan internal, maupun masukan para stake holders.;

Penyusunan Renstra memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Brebes sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Brebes dan KLHS menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana atau program agar dampak dan/atau resiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan.

Dinas Perhubungan sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Brebes harus dapat mewujudkan sasaran penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Brebes dalam bidang perhubungan. Mewujudkan Kabupaten Brebes yang maju dan sejahtera tidak terlepas dari ketersediaan jaringan dan sistem infrastruktur transportasi yang sanggup mendukungnya. Transportasi memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategis dalam Pembangunan Daerah. Transportasi berperan sebagai penggerak dan pendorong dalam memperlancar roda kegiatan perekonomian serta berperan penting dalam produksi, distribusi, dan arus pergerakan penumpang dan jasa ke seluruh pelosok wilayah.

Setiap instansi pemerintah selalu berusaha mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (Good Government). Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Selanjutnya Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan SKPD (Renja SKPD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta laporan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes 2023 – 2026 antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 639);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



- Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembar Negara Tahun 2020 Nomor 57);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 25. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah 2018 – 2023;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten



Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah;
28. Peraturan Bupati Brebes Nomor 111 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes
29. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026 adalah memberikan arah dan pedoman bagi semua personil Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas – prioritas di bidang perencanaan pembangunan sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2023 – Tahun 2026 dapat tercapai serta memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (Stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026 adalah meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Brebes.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 ini memuat Rencana Kerja Dinas Perhubungan sesuai dengan Visi Misi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Brebes terpilih, yang diuraikan dalam 8 Bab dan 15 Sub Bab sebagai berikut:

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes 2023 - 2026

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan hingga saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS



PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program, telaahan renstra Kementerian/Lembaga terkait dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi serta penentuan isu-isu strategis Dinas Perhubungan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi strategi dan arah kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Brebes.

BAB VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Dinas Perhubungan.



BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3); dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 111 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.

Dinas Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang perhubungan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan program kerja dinas sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan keselamatan transportasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan keselamatan transportasi dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah daerah provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan;
- d. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;



- e. menyelenggarakan kebijakan di bidang Lalu Lintas dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah daerah, propinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan;
- f. menyelenggarakan kebijakan di bidang Angkutan dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah daerah, propinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan;
- g. menyelenggarakan kebijakan di bidang Keselamatan Transportasi dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah daerah, propinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan;
- h. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan umum serta kepegawaian;
- i. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPT Dinas dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah Kepala Dinas.

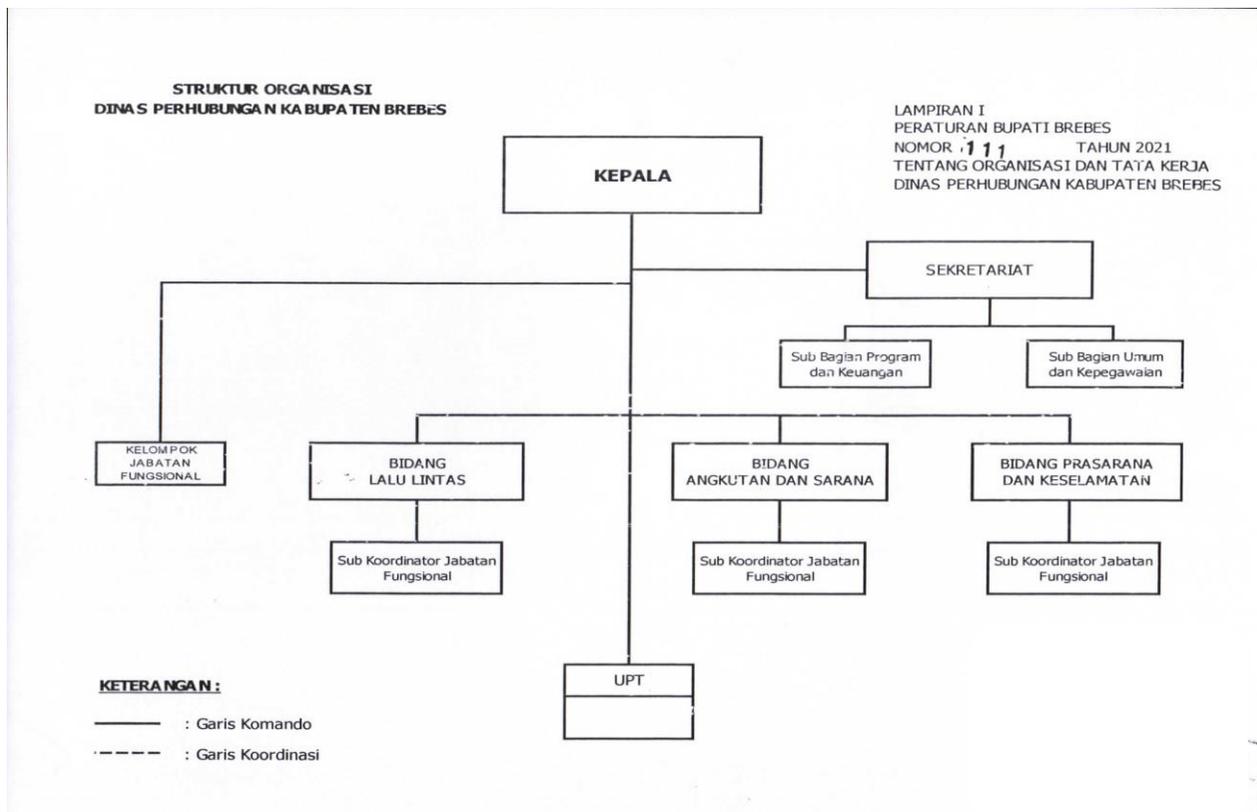
Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Lalu Lintas;
- d. Bidang Angkutan dan Sarana;
- e. Bidang Prasarana dan Keselamatan; dan
- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes seperti pada gambar di bawah ini :

Gambar II.1

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes



SEKRETARIAT

Sekretariat merupakan unsur pembantu kepala dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas :

- Menyusun konsep program kerja dinas sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- Mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- Mengonsep program kerja dan laporan dinas dengan mengkoordinasikan penyusunan program dan laporan dari bidang-bidang;
- Menyelia pengelolaan keuangan dinas dengan cara mengarahkan pelaksanaan teknis penyusunan anggaran, belanja umum dan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan;
- Menyusun konsep bidang keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan hukum;
- Menyelenggarakan ketatausahaan dinas dengan menyelia pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan pelayanan pimpinan;



- h. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas dengan mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana prasarana dan pengadaan serta penghapusan barang inventaris;
- i. Menyelia pengelolaan administrasi kepegawaian dinas untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia;
- j. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- k. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah Kepala Dinas.

SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan program kerja bidang program dan keuangan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. Melaksanakan kegiatan perencanaan dengan mengelola bahan penyusunan rencana kerja dinas secara periodik;
- e. Menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan dinas;
- f. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring;
- g. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dinas dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas;
- h. Melaksanakan perencanaan keuangan dinas dengan mengelola bahan penyusunan rencana anggaran, belanja umum dan kegiatan;
- i. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dinas meliputi analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
- j. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- k. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah Kepala Dinas.



SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan program kerja bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. Mendistribusikan tugas dan menyalurkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. Melaksanakan ketatausahaan dinas dengan mengelola surat masuk, surat keluar, penataan arsip dan dokumen, legalisasi surat, Sistem Informasi Manajemen dinas;
- e. Menyiapkan bahan keorganisasian, kehumasan dan hukum dinas dengan menyiapkan bahan analisis dan kajian yang diperlukan dinas;
- f. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dinas dengan menyalurkan administrasi barang inventaris/aset, barang pakai habis, pemeliharaan sarana prasarana kantor, pengadaan dan penghapusan barang inventaris/aset;
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi presensi pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, gaji dan tunjangan, pendidikan, kesejahteraan, disiplin, promosi, mutasi dan penatausahaan pegawai;
- h. Melaksanakan pengelolaan pensiun, cuti, daftar nominatif pegawai dan daftar urutan kepangkatan, Penilaian Prestasi Kerja dan urusan kepegawaian lain;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pimpinan dalam dan luar kantor dengan menyiapkan administrasi dan sarana prasarana yang diperlukan kepala dinas;
- j. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- k. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah Kepala Dinas.

BIDANG LALU LINTAS

Bidang Lalu Lintas merupakan unsur pelaksana di bidang manajemen, rekayasa, pengendalian lalu lintas, perlengkapan jalan dan perairan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen, rekayasa, pengendalian lalu lintas, perlengkapan jalan dan perairan.



Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas melaksanakan *fungsi* :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan bidang manajemen, rekayasa, pengendalian lalu lintas, perlengkapan jalan dan perairan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, pelaksanaan bidang inspeksi sarana prasarana dan analisis dampak lalu lintas;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, pelaksanaan dan operasional bidang manajemen, rekayasa, pengendalian, inspeksi sarana prasarana dan analisis dampak lalu lintas; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Lalu Lintas, sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan program kerja bidang lalu lintas sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan manajemen dan operasional rekayasa dan pengendalian lalu lintas sesuai aturan yang berlaku dan melaksanakan kegiatan dan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan bidang lalu lintas;
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan manajemen dan operasional kegiatan inspeksi sarana prasarana dan analisis dampak lalu lintas sesuai aturan yang berlaku dan melaksanakan pengelolaan perijinan bidang Lalu Lintas;
- f. Mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan pada bidang lalu lintas agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- g. Mengendalikan pelaksanaan di bidang lalu-lintas dinas perhubungan agar sesuai dengan sasaran kerja;
- h. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- i. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah Kepala Dinas.

Susunan Organisasi Bidang Lalu Lintas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, yang terbagi atas dua Sub Koordinator. Sub Koordinator adalah Aparatur Sipil Negara yang



diberikan tugas untuk membantu Kepala Bagian/ Kepala Bidang/ Sekretaris/ Koordinator dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya dan ditunjuk oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Sub Koordinator terdiri dari :

- a. Sub Koordinator Manajemen, Rekayasa dan Pengendalian Lalu Lintas; dan
- b. Sub Koordinator Inspeksi Sarana Prasarana dan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Sub Koordinator bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Lalu Lintas.

SUB KORDINATOR MANAJEMEN, REKAYASA DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS

Sub Koordinator Manajemen, Rekayasa dan Pengendalian Lalu Lintas, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan operasional bidang manajemen rekayasa dan pengendalian lalu lintas, meliputi :

1. Menyiapkan bahan program kerja sub koordinator manajemen, rekayasa dan pengendalian lalu lintas sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas perhubungan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas perhubungan;
3. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
4. Melaksanakan penyelenggaraan manajemen kapasitas pada jalan kabupaten dan penyelenggaraan manajemen prioritas pada jalan kabupaten serta penyelenggaraan manajemen permintaan pada jalan kabupaten sesuai aturan yang berlaku;
5. Melaksanakan pemeriksaan dan penertiban terhadap spesifikasi kendaraan dan ketaatan uji berkala pada kendaraan bermotor wajib uji di jalan dan pengawasan dan penertiban terhadap perparkiran kendaraan di jalan sesuai aturan yang berlaku;
6. Melaksanakan pemeriksaan dan penertiban terhadap administrasi dan operasional trayek angkutan penumpang umum di jalan dan pelanggaran manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan sesuai aturan yang berlaku;
7. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
8. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.



SUB KORDINATOR INSPEKSI SARANA PRASARANA DAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Sub Koordinator Inspeksi Sarana Prasarana dan Analisis Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang inspeksi sarana prasarana dan analisis dampak lalu lintas, meliputi:

1. Menyiapkan bahan program kerja sub koordinator inspeksi sarana prasarana dan analisis dampak lalu lintas sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas perhubungan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas perhubungan;
3. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
4. Melaksanakan penyelenggaraan analisis dan mitigasi dampak lalu lintas untuk pembangunan pusat kegiatan baru pada jalan kabupaten sesuai aturan yang berlaku;
5. Melaksanakan pemantauan analisis dan mitigasi dampak lalu lintas untuk pembangunan pusat kegiatan baru pada jalan provinsi dan nasional sesuai aturan yang berlaku;
6. Melaksanakan inspeksi keselamatan terhadap jalan kabupaten, inspeksi keselamatan dan bantuan SAR (search and rescue) perairan di wilayah kabupaten, inspeksi perlengkapan pendukung pengujian kendaraan bermotor serta melaksanakan pengawasan sarana prasarana dermaga pelabuhan lokal/regional sesuai aturan yang berlaku;
7. Melaksanakan audit keselamatan terhadap jalan kabupaten dan pemeriksaan sarana prasarana pendukung di terminal sesuai aturan yang berlaku;
8. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
9. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

BIDANG ANGKUTAN DAN SARANA

Bidang Angkutan dan Sarana merupakan unsur pelaksana di bidang angkutan dan pengujian sarana, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Angkutan dan Sarana, dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Angkutan dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan dan pengujian sarana.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Angkutan dan Sarana, melaksanakan *fungsi*:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan bidang angkutan;



- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan bidang pengujian sarana;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan operasional bidang angkutan dan pengujian sarana; dan
- d. Pelaksanaan Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas Bidang Angkutan dan Sarana sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan program kerja bidang angkutan dan sarana sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan manajemen dan operasional bidang angkutan sesuai aturan yang berlaku dan melaksanakan kegiatan dan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan bidang angkutan dan sarana;
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan manajemen dan operasional bidang pengujian sarana sesuai aturan yang berlaku dan melaksanakan pengelolaan perijinan bidang angkutan dan sarana;
- f. Mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan pada bidang angkutan dan sarana agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- g. Mengendalikan pelaksanaan di bidang angkutan dan sarana dinas perhubungan agar sesuai dengan sasaran kerja;
- h. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- i. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah Kepala Dinas.

Susunan Organisasi Bidang Angkutan dan Sarana, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, yang terbagi atas dua Sub Koordinator.

Sub Koordinator terdiri dari :

- a. Sub Koordinator Angkutan; dan
- b. Sub Koordinator Pengujian Sarana.



Sub Koordinator bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Angkutan dan Sarana.

SUB KOORDINATOR ANGKUTAN

Sub Koordinator Angkutan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan kegiatan penataan jaringan angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek serta operasional terminal tipe C dan pelabuhan Lokal, meliputi::

1. Menyiapkan bahan program kerja sub koordinator angkutan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas perhubungan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas perhubungan;
3. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
4. Melaksanakan penataan jaringan trayek angkutan umum, pembinaan pengusaha dan badan usaha angkutan umum dan pengawasan/penataan operasional terminal Tipe C sesuai aturan yang berlaku;
5. Melaksanakan administrasi trayek angkutan umum, terhadap pool dan agen bus, penyediaan perijinan dan manajemen operasional terminal tipe C bagi angkutan umum perkotaan dan pedesaan sesuai aturan yang berlaku;
6. Melaksanakan perencanaan, penetapan dan pengawasan tarif pelayanan angkutan, penataan administrasi angkutan antar jemput dalam provinsi, antar jemput antar provinsi dan angkutan pariwisata, penataan jaringan lintas angkutan barang sesuai aturan yang berlaku;
7. Melaksanakan perencanaan, penetapan dan pengawasan tarif pelayanan pada angkutan jalan dan perairan tidak dalam trayek, perencanaan dan pembinaan terhadap angkutan tidak dalam trayek lainnya sesuai aturan yang berlaku;
8. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
9. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

SUB KOORDINATOR PENGUJIAN SARANA

Sub Koordinator Pengujian Sarana, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan kegiatan pengujian sarana angkutan, meliputi:

1. Menyiapkan bahan program kerja sub koordinator pengujian sarana sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;



2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas perhubungan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas perhubungan;
3. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
4. Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian kendaraan bermotor secara berkala, kendaraan angkutan penumpang umum di terminal dan memberikan petunjuk teknis tentang persyaratan wajib uji kendaraan bermotor sesuai aturan yang berlaku;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bengkel dan perusahaan karoseri, peninjauan lokasi dan membuat laporan jika terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Brebes khususnya untuk kendaraan barang dan kendaraan angkutan umum sesuai aturan yang berlaku;
6. Pengelolaan data dan informasi pengujian sarana;
7. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
8. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN

Bidang Prasarana dan Keselamatan merupakan unsur pelaksana di bidang perencanaan, pembangunan, pengoperasian prasarana, perawatan prasarana dan keselamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan Bidang Prasarana dan Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, pengoperasian prasarana, perawatan prasarana dan keselamatan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Prasarana dan Keselamatan, melaksanakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan dan pelaksanaan bidang Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan bidang Perawatan Prasarana dan Keselamatan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, pelaksanaan dan operasional bidang Perencanaan, Pembangunan, Pengoperasian Prasarana, Perawatan Prasarana dan Keselamatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



Uraian Tugas Bidang Prasarana dan Keselamatan, sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan program kerja bidang prasarana dan keselamatan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan manajemen dan operasional bidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana sesuai aturan yang berlaku dan melaksanakan kegiatan dan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan bidang prasarana dan keselamatan;
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan manajemen dan operasional bidang perawatan prasarana dan keselamatan sesuai aturan yang berlaku dan melaksanakan pengelolaan perijinan bidang prasarana dan keselamatan;
- f. Mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan pada bidang prasarana dan keselamatan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- g. Mengendalikan pelaksanaan di bidang prasarana dan keselamatan dinas perhubungan agar sesuai dengan sasaran kerja;
- h. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- i. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah Kepala Dinas.

Susunan Organisasi Bidang Prasarana dan Keselamatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, yang terbagi atas dua Sub Koordinator.

Sub Koordinator terdiri dari :

- a. Sub Koordinator Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana; dan
- b. Sub Koordinator Perawatan Prasarana dan Keselamatan.

Sub Koordinator bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan.

SUB KOORDINATOR PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA



Sub Koordinator Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan kegiatan Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana, meliputi:

1. Menyiapkan bahan program kerja sub koordinator perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas perhubungan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas perhubungan;
3. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
4. Melaksanakan perencanaan prasarana dan operasional prasarana keselamatan, penyediaan prasarana dan operasional keselamatan sesuai aturan yang berlaku;
5. Melaksanakan Pengawasan/penyediaan sarana Penerangan Jalan Umum, sarana Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas, sarana rambu-rambu Lalu lintas sesuai aturan yang berlaku;
6. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
7. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

SUB KOORDINATOR PERAWATAN PRASARANA DAN KESELAMATAN

Sub Koordinator Perawatan Prasarana dan Keselamatan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan kegiatan Perawatan Prasarana dan Keselamatan, meliputi:

1. Menyiapkan bahan program kerja sub koordinator perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas perhubungan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas perhubungan;
3. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
4. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan operasional prasarana keselamatan, penerangan jalan umum, alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu rambu lalu lintas sesuai aturan yang berlaku;
5. Melaksanakan perencanaan dan pemeliharaan prasarana trotoar, perawatan/pemeliharaan instalasi perangkat dan pemeliharaan ruang edukasi lalu lintas, papan informasi lalu lintas elektronik sesuai aturan yang berlaku;



- 6. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- 7. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- 9. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan

2.2.1 Sumber Daya Manusia:

Dinas Perhubungan memiliki SDM sejumlah 48 orang PNS dan 8 CPNS, terdiri dari 48 orang laki-laki (86 %) dan 8 orang perempuan (14 %), dengan prosentase tingkat pendidikan strata 2 sebanyak 3 orang (5 %), strata 1 sebanyak 23 orang (41 %), diploma 3 sebanyak 5 orang (9 %), diploma 2 sebanyak 2 orang (3 %), SMA sebanyak 20 Orang (35 %), SMP sebanyak 1 orang (1 %) dan SD sebanyak 2 Orang (3 %). Susunan komposisi pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasar Golongan

NO.	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Golongan IV	4	
2.	Golongan III	25	
3.	Golongan II	25	
4.	Golongan I	2	
	JUMLAH	56	

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Perhubungan 2022

Berdasarkan tabel diatas, komposisi pegawai terdiri dari pegawai Golongan I sebanyak 2 orang (3,57 %), Golongan II sebanyak 25 orang (44,64 %), Golongan III sebanyak 25 (44,64 %), Golongan IV sebanyak 4 orang (7,14 %).

Sedangkan untuk komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasar Pendidikan

NO.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Pasca Sarjana / S2	3	
2.	Sarjana / S1	23	
3.	Sarjana Muda / D II / D III	5	
4.	SLTA	20	
5.	SLTP	1	



6.	SD	2	
	Jumlah	56	

Data Per Mei 2022

Data tabel diatas menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes, prosentase tingkat pendidikan strata 2 sebanyak 3 orang (5 %), strata 1 sebanyak 23 orang (41 %), diploma 3 sebanyak 5 orang (9 %), diploma 2 sebanyak 2 orang (3 %), SMA sebanyak 20 Orang (35 %), SMP sebanyak 1 orang (1 %) dan SD sebanyak 2 Orang (3 %).

Jumlah tersebut memang masih belum optimal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dikarenakan kekurangan tenaga dengan kualifikasi yang spesifik di bidang transportasi yang berkeselamatan. Untuk mendukung kinerja Dinas Perhubungan ada baiknya agar dapat dialokasikan formasi untuk penambahan SDM dengan Kualifikasi Administrasi dan Kualifikasi Teknis.

2.2.2. Aset Dinas:

Aset merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Gedung: - Kantor - Terminal tipe C (Brebes, Jatibarang, Banjarharjo, Larangan, Bumiayu) Ketanggungan - Pangkalan Truk Kecipir Kec. Losari - Pengujian Kendaraan Bermotor (Grinting & Pagojengan) - Pos Pelabuhan Kluwut	1 Unit 5 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit	Baik/Terawat Baik/Terawat Telah dibongkar Baik/Terawat Baik/Terawat Baik/Terawat
2	Kendaraan: - Mobil Operasional - Truk skylift - Sepeda Motor Operasional - Perahu Karet - Perahu Fiber	10 Unit 2 Unit 1 unit 26 Unit 1 Unit 1 Unit	Baik/Rusak Baik/Terawat Baik/Tusak Baik/Rusak Rusak Rusak
3	Prasarana LLAJ:		



	- Rambu Lalu Lintas Terpasang	667 Unit	Baik/Rusak
	- Rambu Lalu Lintas Portabel	30 Unit	Baik/Rusak
	- Pagar Pengaman Jalan	120 Meter	Baik
	- Water Barrier	105 Unit	Baik
	- Traffic Cone	100 Unit	Baik
	- Traffic Light	19 Unit	Baik
	- Warning Light	29 Unit	Baik
	- Pos Jaga Perlintasan Sebidang	9 Unit	Baik
	- Cermin Tikungan	20 Unit	Baik
	- Halte	8 Unit	Baik
	- Lampu Suar	6 Unit	Baik/Rusak
	- Penerangan Jalan Umum (PJU)	23.450 Unit	Baik/Terawat
	- Drone	1 Unit	Rusak
	- Speed Gun	4 Unit	Baik
	- Handy Talky (HT)	40 Unit	Baik
	- CCTV	16 Unit	Baik
4	Alat Alat Pengujian kendaraan Bermotor:		
	- Genset	2 Unit	Baik
	- Kompresor	2 Unit	Baik
	- Sound Level meter	1 Unit	Baik
	- CO/HC Emission Analyser	2 Unit	Baik
	- Diesel smoke meter	2 Unit	Baik
	- Side Slip tester	1 Unit	Baik
	- Axle Load meter	1 Unit	Baik
	- Portabel Axle Load Meter	1 Unit	Baik
	- Combination Tester	1 Unit	Baik
	- Brake Tester	1 Unit	Baik
	- Head Light tester	2 Unit	Baik
	- Window Tint tester	1 Unit	Baik

Sejauh ini, dengan ketersediaan Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan dapat menunjang kinerja secara optimal. Namun memang dengan keterbatasan aset ini, juga membuat potensi pengembangan pelayanan menjadi terhambat. Penambahan aset berupa Kendaraan dan Prasarana LLAJ mutlak dibutuhkan untuk memberikan cakupan pelayanan yang luas kepada masyarakat.



2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan merencanakan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsinya yang telah dicapai pada jangka waktu lima tahun sebelumnya. Dalam mewujudkan kinerja pelayanan yang direncanakan terdapat berbagai kendala dengan pendanaan yang terbatas oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah maupun pihak-pihak lainnya seperti Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung terwujudnya program pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi memberikan kemudahan dalam distribusi barang atau jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selain itu, pertumbuhan kendaraan pribadi dan angkutan umum di Kabupaten Brebes, harus diiringi dengan pembangunan sarana jalan dan jembatan yang memadai, sehingga mobilisasi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar.

Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes selama periode Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Capaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Tabel 2.16.sebagai berikut:

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes 2017 – 2022

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi	Realisasi Capaian Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penumpang semua moda angkutan umum dalam setahun	410.366	331.763	597.181	362.688	203.713
2	Jumlah Trayek Bis AKAP:	6 PO.	6 PO.	6 PO.	6 PO.	6 PO.
	- Jumlah izin trayek Bis yang di keluarkan	0 Kend	0 Kend	0 Kend	0 Kend	0 Kend
3	Jumlah Trayek AKDP:	5 Trayek	5 Trayek	5 Trayek	5 Trayek	5 Trayek
	- Jumlah izin trayek AKDP yang di keluarkan	0 Kend	0 Kend	0 Kend	0 Kend	0 Kend
4	Jumlah Trayek Angkutan :	54 Trayek	54 Trayek	42 Trayek	42 Trayek	42 Trayek
	- Jumlah kendaraan Angkutan Perdesaan siap operasi	605 unit	605 unit	614 unit	614 unit	614 unit
	- Jumlah kendaraan yang izin insidentil	0 rekom	0 rekom	0 rekom	0 rekom.	0 rekom.
	- Jumlah kendaraan yang izin trayek	87 rekom.	146 rekom.	92 rekom.	84 rekom.	36 rekom.
5	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)	9.011	9.520	9.064	9.170	8.678



6	Jumlah Terminal :					
	- Tipe A	-	-	-	-	-
	- Tipe B	2	2	2	2	2
	- Tipe C	6	6	6	6	6
	- Pangkalan Truk	1	1	1	1	1
7	Jumlah Angkutan Darat:					
	- AKAP	AKAP : 444				
	- AKDP	AKDP : 254	AKDP : 254	AKDP : 147	AKDP : 147	AKDP : 147
	- Angkudes	Angdes : 605	Angdes : 605	Angdes : 614	Angdes : 614	Angdes : 614
8	Jumlah rambu lalu lintas yang telah terpasang.	657 unit	657 unit	657 unit	657 unit	
9	Jumlah Halte	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	0 unit

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Brebes (2017 - 2022)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Terget Renstra Perangkat Daerah pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Laporan Pelaksanaan Pengendalian Dan Penegakkan Disiplin Lalu Lintas (Laporan)				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan					12 Laporan	0%	0%	0%	0%	100%
2	Pengadaan Perlengkapan Jalan Portable Pendukung MRL (Paket)				0 paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket					0 paket	0%	0%	0%	0%	0%



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Terget Renstra Perangkat Daerah pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
3	Jumlah Paku Jalan (Buah)				2.300 Buah	2.300 Buah	2.300 Buah	2.300 Buah	2.300 Buah					0 Buah	0%	0%	0%	0%	0%
4	Laporan Kegiatan Pengamanan Hari – Hari Tertentu (Laporan)				0 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan					63 Laporan	0%	0%	0%	0%	95,23%
5	Penyusunan Kajian Teknis Transportasi (Dokumen)				0 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen					0 Dokumen	0%	0%	0%	0%	0%
6	Laporan Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas (Laporan)				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan					12 Laporan	0%	0%	0%	0%	100%
7	Dokumen Inspeksi Monitoring dan Evaluasi Andalalin (Laporan)				0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan					0 Laporan	0%	0%	0%	0%	0%
8	Peralatan Survey Inspeksi Keselamatan (Paket)				0 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket					0 paket	0%	0%	0%	0%	0%
9	Pengadaan Kendaraan Operasional Inspeksi, Monitoring Dan Evaluasi (Unit)				0 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit					0 Unit	0%	0%	0%	0%	0%
10	Pengadaan Mobil Derek (Unit)				0 Unit	0 Unit	1 unit	1 Unit	1 Unit					0 Unit	0%	0%	0%	0%	0%
11	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Inspeksi, Monitoring Dan Evaluasi (Unit)				0 Unit	0 Unit	0 Unit	2 Unit	4 Unit					1 Unit	0%	0%	0%	0%	25%



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
12	Inspeksi Dan Evaluasi Kinerja Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) (Laporan)				0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan					12 Laporan	0%	0%	0%	0%	100%
13	Pembangunan Pos Jaga, Palang Pintu dan Kelengkapannya (unit)				0 unit	0unit	2 unit	0 unit	0 unit	0 Unit	0 Unit	2 Unit	0 Unit	0 unit	0%	0%	100%	0%	0%
14	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan Jalan (Laporan)				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan					12 Laporan	0%	0%	0%	0%	100%
15	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan Perairan Daratan (Laporan)				0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan					0 Laporan	0%	0%	0%	0%	0%
16	Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Kabupaten (Orang)				0 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang					0 Orang					
17	Jumlah Laporan Kinerja Terminal (Laporan)				0 Laporan	84 Laporan	84 Laporan	84 Laporan	84 Laporan					84 Laporan	0%	0%	0%	0%	100%
18	Jumlah Laporan Rekapitulasi Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kendaraan/Tahun (Laporan)				8.852 Unit	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan					12 Laporan	0%	0%	0%	0%	100%
19	Jumlah Laporan Kegiatan Ramp Check Di Terminal (Laporan)				0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan					12 Laporan	0%	0%	0%	0%	100%



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Terget Renstra Perangkat Daerah pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
20	Jumlah PJU Terpasang (Unit)				1.208	1.500 Unit	1.698 Unit	1.887 Unit	2.075 Unit	23450 Unit	23450 Unit	24837 Unit	24837 Unit	249 Unit					
21	Pengadaan dan instalasi Delineator (Unit)				0 Unit	1.000 Unit	1.000 Unit	1.000 Unit	1.000 Unit					0 Unit	0%	0%	0%	0%	0%
22	Panjang Marka Jalan (m2)				393 m2	1.300 m2	1.300 m2	1.300 m2	1.300 m2					120 m2	0%	0%	0%	0%	9,2%
23	Panjang Pagar Pengaman Jalan Yang Terpasang (meter)				0 meter	1.000 meter	1.000 meter	1.000 meter	1.000 meter	80 meter	80 meter	80 meter	80 meter	648 meter	8%	8%	8%	8%	8%
24	Jumlah Rambu Lalu Lintas Yang Terpasang (Unit)				634 Unit	300 Unit	300 Unit	300 Unit	300 Unit	657 Unit	657 Unit	657 Unit	657 Unit	14 Unit					
25	Jumlah Cermin Di Tikungan Rawan Kecelakaan (Unit)				20 Unit	70 Unit	120 Unit	170 Unit	220 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	0 Unit	0%	0%	0%	0%	0%
26	Peningkatan Landasan dan Utilitas Rest Area Angkutan Barang Kecipir (m2)				3.000 m2	3.000 m2	4.500 m2	6.000 m2	7.500 m2					0 m2	0%	0%	0%	0%	0%
27	Pembangunan dan Pengembangan Dermaga (Unit)				1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit					0 Unit	0%	0%	0%	0%	0%
28	Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Komersial (Unit)				0 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit					0 Unit	0%	0%	0%	0%	0%
29	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan LLAJ (Kegiatan)				0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan					0 Kegiatan	0%	0%	0%	0%	0%
30	Penyuluhan Keselamatan Berlalu Lintas (Orang)				0 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang					0 Orang	0%	0%	0%	0%	0%



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Terget Renstra Perangkat Daerah pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
31	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ (Orang)				0 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang					0 Orang	0%	0%	0%	0%	0%
32	Jumlah Halte Terbangun (Unit)				4 unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	30 Unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	0 Unit	100%	25%	26%	26%	13%
33	Pembangunan Area Traffic Control System (ATCS)(Unit)				0 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit					0 Unit	0%	0%	0%	0%	0%
34	Jumlah PJU Yang Terpelihara (Unit)				22.368 Unit	23.450 Unit	24.450 Unit	25.450 Unit	26.450 Unit					3042 Unit					11,5%
35	Pemeliharaan dan Revitalisasi Traffic Light dan Warning Light serta Peringatan Dini Perlintasan Sebidang (PDPS) (Unit)				0 Unit	61 Unit	61 Unit	61 Unit	61 Unit					26 Unit					42,6%
36	Pemeliharaan dan Pengembangan Pelabuhan dan Dermaga (Lokasi)				0 Lokasi	0 Lokasi	2 Lokasi	4 Lokasi	6 Lokasi					0 Lokasi	0%	0%	0%	0%	0%
37	Pemeliharaan Landasan dan Utilitas Rest Area Angkutan Barang Kecipir (m2)				3.000 m2	3.000 m2	3.000 m2	4.500 m2	6.000 m2					0 m2	0%	0%	0%	0%	0%
38	Pemeliharaan Lampu Suar (Buah)				0 Buah	6 Buah	6 Buah	6 Buah	6 Buah					7 Buah	0%	0%	0%	0%	100%
39	Pemeliharaan dan Operasional ATCS (Unit)				0 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit					0 Unit	0%	0%	0%	0%	0%



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
40	Pemeliharaan Prasarana Terminal Angkutan Jalan (Terminal)				0 Terminal	7 Terminal	7 Terminal	7 Terminal	7 Terminal					0 Terminal	0%	0%	0%	0%	0%



Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program pengembangan fasilitas lalu lintas jalan															
	Pemeliharaan dan pengadaan lampu PJU	8.785.610.000	14.657.986.000				8.605.765.079	14.259.175.391				97,95%	97,28%			
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					45.096.701					-					0,00%
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.333.798.063					4.988.951.299					93,53%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					118.843.700					119.561.280					100,60%



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					3.164.400					508.000					16,05%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					-					435.000					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					-					-					
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya															
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4.886.000					3.140.000					64,27%



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					132.303.309					93.112.536					70,38%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					152.010.000					72.619.000					47,77%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					157.851.850					74.401.000					47,13%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					20.000.000					16.104.000					80,52%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu					38.900.000					1.417.500					3,64%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					180.923.357					116.482.037					64,38%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
	Pengadaan Mebel					32.400.000					13.527.273					41,75%



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
7	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					46.905.000					42.440.000					90,48%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					344.918.400					206.233.151					59,79%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					155.429.055					148.122.000					95,30%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					231.342.100					206.177.500					89,12%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					434.177.960					264.708.411					60,97%
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					243.497.000					240.204.000					98,65%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota															
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					5.765.896.420					5.617.330.266					97,42%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan					369.400.000					343.819.000					93,07%
10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					944.281.500					917.402.088					97,15%
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C															



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
11	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal					29.600.000					28.205.000					95,29%
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C					16.920.000					6.175.000					36,50%
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor															
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					14.390.000					14.020.000					97,43%
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					716.857.120					644.011.900					89,84%
12	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota															



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
13	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					326.156.000					299.490.000					91,82%
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					607.289.100					547.155.500					90,10%
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan															
	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ					78.599.950					64.112.950					81,57%
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal					2.320.320.000					2.093.560.000					90,23%



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
14	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					92.967.000					58.470.400					62,89%
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota					648.000					-					0,00%
15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
	Penyediaan jasa surat menyurat	12.375.000	12.375.000	38.775.000	44.167.000		11.475.000	10.305.000	32.420.000	41.656.000		92,73%	83,27%	83,61%	94,31%	



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	172.500.000	250.000.000	250.000.000	345.743.000		122.969.751	114.930.293	112.218.550	164.171.703		71,29%	45,97%	44,89%	47,48%	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	118.633.000	144.276.000	155.728.000	107.692.820		109.654.906	116.180.199	124.174.088	91.806.400		92,43%	80,53%	79,74%	85,25%	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	70.090.000	78.125.000	91.450.000	220.056.030		67.981.310	70.205.123	82.238.091	202.603.000		96,99%	89,86%	89,93%	92,07%	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20.401.000	43.981.000	77.909.000	55.831.260		18.500.000	33.900.636	64.524.908	45.081.182		90,68%	77,08%	82,82%	80,75%	
	Penyediaan alat tulis kantor	12.325.000	14.500.000	17.000.000	26.855.980		11.429.250	11.914.519	10.742.182	13.127.100		92,73%	82,17%	63,19%	48,88%	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	105.277.000	123.639.000	128.740.000	90.486.080		99.101.675	121.727.000	120.438.200	75.534.600		94,13%	98,45%	93,55%	83,48%	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.500.000	8.000.000	8.000.000	5.806.000		4.125.000	5.176.363	6.207.273	2.416.000		30,56%	64,70%	77,59%	41,61%	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	52.580.000	171.801.000	132.500.000	173.244.400		41.234.000	153.414.545	125.276.000	120.258.090		78,42%	89,30%	94,55%	69,42%	
	Penyediaan Peralatan Rumah tangga		5.000.000		1.417.000			3.204.545		1.160.000			64,09%		81,86%	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	27.000.000	27.000.000	30.000.000	20.000.000		17.292.000	19.063.000	15.456.000	16.874.000		64,04%	70,60%	51,52%	84,37%	



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
16	Penyediaan makanan dan minuman	80.630.000	69.887.500	113.618.000	164.599.000		62.961.500	42.330.000	73.608.000	56.536.000		78,09%	60,57%	64,79%	34,35%	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	172.327.000	221.117.000	240.691.000	204.880.000		171.134.099	220.088.613	238.957.620	147.550.225		99,31%	99,53%	99,28%	72,02%	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	103.702.000	124.970.000	112.000.000	157.825.000		103.502.791	124.227.158	97.917.557	71.916.092		99,81%	99,41%	87,43%	45,57%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
	Pembangunan gedung kantor				110.000.000					109.257.000					99,32%	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.406.068.000	683.240.000	504.885.000	365.725.000		1.389.377.000	667.737.500	487.581.000	356.676.000		98,81%	97,73%	96,57%	97,53%	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	99.580.000	134.081.000	158.200.000	111.243.380		94.202.782	115.415.580	85.070.760	66.030.952		94,60%	86,08%	53,77%	59,36%	
	Pengadaan mebeleur				15.714.810					14.800.000					94,18%	
17	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair		5.000.000	5.000.000				4.740.000	4.740.000				94,80%	94,80%		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															
18	Pendidikan dan pelatihan formal		5.000.000		-			4.600.000		-			92,00%			
	Program peningkatan disiplin aparatur															
	Pengadaan pakaian dinas beserta	65.861.000		121.883.000	-		65.450.000		120.118.000	-		99,38%		98,55%		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
19	perlengkapannya															
	Pendidikan dan pelatihan formal			12.000.000	-				12.000.000	-				100,00%		
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	22.500.000					22.000.000					97,78%				
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan															
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.259.000	5.000.000	6.000.000	5.120.000		3.836.100	4.294.591	4.599.000	3.815.000		90,07%	85,89%	76,65%	74,51%	
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	4.259.000	5.000.000	6.000.000	5.020.000		3.742.100	4.457.000	4.599.200	3.440.000		87,86%	89,14%	76,65%	68,53%	
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.259.000	5.000.000	6.000.000	4.729.000		3.888.100	4.416.909	4.595.200	3.382.000		91,29%	88,34%	76,59%	71,52%	
Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	4.259.000					3.819.650					89,68%					
20	Program Manajemen, Rekayasa, Pengendalian dan Inspeksi Keselamatan Lalu lintas															
	Manajemen, Rekayasa dan Pengendalian Lalu lintas			566.160.000	2.345.683.806				492.107.820	2.171.786.656				86,92%	92,59%	
	Inspeksi dan Keselamatan Lalu Lintas			1.652.564.000	2.275.964.620				1.587.998.048	2.140.991.950				96,09%	94,07%	



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
21	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor															
	Pelayanan Angkutan			129.030.000	296.180.240			114.436.500	291.710.500					88,69%	98,49%	
	Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor			3.973.330.000	712.385.244			3.819.225.109	644.434.999					96,12%	90,46%	
22	Program Sarana dan Prasarana Perhubungan															
	Perencanaan, Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan			12.796.412.000	7.201.564.030			12.456.370.529	6.588.780.078					97,33%	91,49%	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan			1.911.800.000	3.002.499.970			1.801.531.150	2.879.438.001					94,23%	95,90%	
23	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan															
	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	75.157.000	53.652.000				71.512.631	15.609.855				95,15%	29,09%			
	Peningkatan pengelolaan terminal darat angkutan darat		25.000.000					24.280.000					97,12%			
	Rehabilitasi selter dan pengaspalan landasan terminal		400.000.000					394.280.000					98,57%			



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan	100.000.000	100.000.000				97.933.000	98.212.000				97,93%	98,21%			
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ															
	Rehabilitasi/pe meliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	144.901.000	436.184.000				136.480.000	413.322.700				94,19%	94,76%			
	Pemeliharaan traffic light/warning light dan PDPS (peringatan dini perlintasan sebidang)	155.190.000	174.804.000				150.839.000	161.798.000				97,20%	92,56%			
	Pemeliharaan dan penjagaan pos perlintasan sebidang	1.306.082.000	1.434.162.000				1.213.071.489	1.381.423.335				92,88%	96,32%			
25	Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas		20.000.000					19.553.000					97,77%			
	Pemeliharaan lampu suar	14.822.000					13.071.000					88,19%				
	Pogram peningkatan pelayanan angkutan															
	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	264.498.000	227.450.000				245.360.000	221.411.000				92,76%	97,34%			



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	58.989.000					53.055.000					89,94%				
	Pengamanan angkutan lebaran		168.985.500					156.640.000					92,69%			
	Peningkatan disiplin lalu lintas laut	19.028.000					12.420.300					65,27%				
	Pembinaan dan pengawasan peraturan di alur perairan daratan	53.090.000					50.671.500					95,44%				
	Pengamanan angkutan lebaran	168.346.000					167.727.697					99,63%				
	Pembinaan petugas parkir	22.492.000					14.036.000					62,40%				
	Penyelenggaraan pekan keselamatan LLAJ	40.500.000	25.000.000				36.465.000	24.968.000				90,04%	99,87%			
26	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan															
	Pembangunan gedung terminal	200.000.000					197.141.000					98,57%				
27	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas															
	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	58.503.000	180.715.000				57.653.000	177.286.000				98,55%	98,10%			
	Pengadaan marka jalan	68.980.000	100.100.000				67.763.500	94.440.000				98,24%	94,35%			
	Pengadaan rambu - rambu sungai	31.020.000					28.745.000					92,67%				



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
28	Inspeksi keselamatan LLAJ	76.091.000	47.146.000				54.084.553	32.634.000				71,08%	69,22%			
	Revitalisasi traffic light dan warning light	62.189.000	62.352.000				52.492.000	52.629.000				84,41%	84,41%			
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor															
	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	338.375.000	4.438.796.000				324.369.000	4.342.753.500				95,86%	97,84%			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program pengembangan fasilitas lalu lintas jalan															
	Pemeliharaan dan pengadaan lampu PJU	8.785.610.000	14.657.986.000				8.605.765.079	14.259.175.391				97,95%	97,27%			
	Pemeliharaan dan pengadaan lampu PJU (Bantuan Gubernur)		2.500.000.000					2.339.765.000					93,59%			



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.259.000				45.096.701	3.836.100									
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
	6 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.030.251.000				5.333.798.063	3.932.892.216				4.988.951.299					
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					118.843.700					119.561.280					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.259.000				3.164.400	3.888.100				508.000					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.259.000					3.742.100				435.000					
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	65.861.000					65.450.000									
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4.886.000					3.140.000					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					132.303.309					93.112.536					
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					152.010.000					72.619.000					
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan					157.851.850					74.401.000					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					20.000.000					16.104.000					



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Fasilitasi Kunjungan Tamu					38.900.000					1.417.500					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					180.923.357					116.842.037					
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
	Pengadaan Mebel					32.400.000					13.527.273					
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					46.905.000					42.440.000					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					344.918.400					206.233.151					
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					155.429.055					148.122.500					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					231.342.100					206.177.500					



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					434.177.960						264.708.411				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					243.497.000						240.204.000				
9	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota															
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					5.765.896.420						5.617.330.266				
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan					369.400.000						343.819.000				
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					944.281.500						917.402.088				
10	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C															



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal					29.600.000					28.205.000					
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C					16.920.000					6.175.000					
11	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor															
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					14.390.000					14.020.000					
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermoto					716.857.120					644.011.900					
12	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota															
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					326.156.000					299.490.000					



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					607.289.100					547.155.500					
13	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan															
	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ					78.599.950					64.112.950					
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal					2.320.320.000					2.093.560.000					
14	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					92.967.000					58.470.400					



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota					648.000										
15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
	Penyediaan jasa surat menyurat		12.375.000	38.775.000	44.167.000			10.305.000	34.420.000	41.656.000						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		250.000.000	250.000.000	345.743.000			114.930.293	112.218.550	164.171.703						
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		144.276.000	155.728.000	107.692.820			116.180.199	124.174.088	91.806.400						
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		78.125.000	91.450.000	220.056.030			70.205.123	82.238.091	202.603.000						
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		43.981.000	77.909.000	55.831.260			33.900.636	64.524.908	45.081.182						
	Penyediaan alat tulis kantor		14.500.000	17.000.000	26.855.980			11.914.519	10.742.182	13.127.100						
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		123.639.000	128.740.000	90.486.080			121.727.000	120.438.200	75.534.600						



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		8.000.000	8.000.000	5.806.000			5.176.363	6.207.273	2.416.000						
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		171.801.000	132.500.000	173.244.400			153.414.545	125.276.000	120.258.090						
	Penyediaan Peralatan Rumah tangga		5.000.000		1.417.000			3.204.545		1.160.000						
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		27.000.000	30.000.000	20.000.000			19.063.000	15.456.000	16.874.000						
	Penyediaan makanan dan minuman		69.887.500	113.618.000	164.599.000			42.330.000	73.608.000	56.536.000						
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		221.117.000	240.691.000	204.880.000			220.088.613	238.957.620	147.550.225						
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		124.970.000	112.000.000	157.825.000			124.227.158	97.917.557	71.916.092						
16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
	Pembangunan gedung kantor				110.000.000					109.257.000						



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		683.240.000	504.885.000	365.725.000			667.737.500	487.581.000	356.676.000						
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		134.081.000	158.200.000	111.243.380			115.415.580	85.070.760	66.030.952						
	Pengadaan mebeleur		5.000.000	5.000.000	15.714.810			4.740.000	4.740.000	14.800.000						
	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair															
17	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															
	Pendidikan dan pelatihan formal		5.000.000	12.000.000				4.600.000	12.000.000							
18	Program peningkatan disiplin aparatur															
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			121.883.000					120.118.000							
	Pendidikan dan pelatihan formal															
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu															



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
19	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan															
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		5.000.000	6.000.000	5.120.000			4.294.591	4.599.000	3.815.000						
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		5.000.000	6.000.000	5.020.000			4.457.000	4.599.200	3.440.000						
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		5.000.000	6.000.000	4.729.000			4.416.909	4.595.200	3.382.000						
	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring		-													
20	Program Manajemen, Rekayasa, Pengendalian dan Inspeksi Keselamatan Lalu lintas															
	Manajemen, Rekayasa dan Pengendalian Lalu lintas			566.160.000	2.345.683.806				492.107.820	2.171.786.656						
	Inspeksi dan Keselamatan Lalu Lintas			1.652.564.000	2.275.964.620				1.587.998.048	2.140.991.950						



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
21	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor															
	Pelayanan Angkutan			129.030.000	296.180.240				114.436.500	291.710.500						
	Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor			3.973.330.000	712.385.244				3.819.225.109	644.434.999						
22	Program Sarana dan Prasarana Perhubungan															
	Perencanaan, Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan			12.796.412.000	7.201.564.030				12.455.370.529	6.588.780.078						
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan			1.911.800.000	3.002.499.970				1.801.531.150	2.879.438.001						
23	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan															
	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan		53.652.000						15.609.855							
	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat		25.000.000						24.280.000							



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Rehabilitasi selter dan pengaspalan landasan terminal		400.000.000					394.280.000								
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan		100.000.000					98.212.000								
24	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ															
	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor		436.184.000					413.322.700								
	Pemeliharaan traffic light/warning light dan PDPS (peringatan dini perlintasan sebidang)		174.804.000					161.798.000								
	Pemeliharaan dan penjagaan pos perlintasan sebidang		1.434.162.000					1.381.423.335								
	Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas		20.000.000					19.553.000								
	Pemeliharaan															



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	lampu suar															
25	Pogram peningkatan pelayanan angkutan															
	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya		227.450.000					221.411.000								
	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan															
	Pengamanan angkutan lebaran		168.985.500					156.640.000								
	Peningkatan disiplin lalu lintas laut															
	Pembinaan dan pengawasan peraturan di alur perairan daratan															
	Pengamanan angkutan lebaran															
	Pembinaan petugas parkir															
	Penyelenggaraan pekan keselamatan LLAJ		25.000.000					24.968.000								



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
26	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan															
	Pembangunan gedung terminal															
27	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas															
	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas		180.715.000					177.286.000								
	Pengadaan marka jalan		100.100.000					94.440.000								
	Pengadaan rambu - rambu sungai															
	Inspeksi keselamatan LLAJ		47.146.000					32.634.000								
	Revitalisasi traffic light dan warning light		62.352.000					52.629.000								
28	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor															
	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor		4.438.796.000					4.342.753.500								





2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Tantangan Dinas Perhubungan :

Berikut ini adalah berbagai tantangan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dari faktor Regulasi, Teknologi, SDM dan Demografi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam wilayah Kabupaten Brebes terbentur pada aturan seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana secara garis besar hal-hal terkait sarana prasarana LLAJ di dalam wilayah Kabupaten hanya boleh mengelola pada ruas-ruas jalan Kabupaten / Lokal saja. Sementara dalam konsep kewilayahan, didalam wilayah Kabupaten terdapat ruas-ruas jalan Nasional / Arteri dan Propinsi / Kolektor. Hal ini membuat Dinas Perhubungan sangat terbatas dalam memfasilitasi masyarakat terkait penyediaan sarana prasarana LLAJ di Kabupaten Brebes;
2. Luasnya wilayah Kabupaten Brebes dan besarnya jumlah penduduk menyebabkan Dinas Perhubungan memiliki tanggungjawab yang besar dalam mencukupi kebutuhan Masyarakat di bidang penyediaan sarana prasarana LLAJ. Tentunya akan lebih optimal manakala hal tersebut didukung dengan kekuatan / ketersediaan anggaran;
3. Penerapan teknologi dibidang Perhubungan juga belum optimal dikarenakan keterbatasan pengelolaan anggaran;
4. Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi;
5. Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor yang belum ada;
6. Terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan dibandingkan dengan perkembangan armada di jalan;
7. Ketersediaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan Dinas Perhubungan. Terkait bahwa ketersediaan SDM hanya dapat dipenuhi dari alokasi CPNS, maka akan lebih baik apabila Dinas Perhubungan mendapat alokasi SDM dari CPNS dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Pelaksana / Ahli bersifat Administrasi;
 - b. Pelaksana/ Ahli bersifat Teknis.

Peluang Dinas Perhubungan:



Terkait dengan tantangan yang harus dihadapi, Dinas Perhubungan tetap optimis dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, dengan langkah – langkah sebagai berikut:

1. Pelayanan masyarakat di bidang penyediaan sarana prasarana LLAJ untuk ruas – ruas jalan Nasional / Arteri dan Propinsi / Kolektor, walaupun tidak dapat dilakukan secara langsung namun dapat dilakukan tindakan koordinatif berupa pembantuan survey kebutuhan sarana prasarana LLAJ untuk kemudian diserahkan ke Kementerian Perhubungan sebagai pengampu jalan Nasional / Arteri maupun ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai pengampu jalan Propinsi / Kolektor. Dengan demikian APBD Kabupaten Brebes dapat lebih dikonsentrasikan untuk melayani masyarakat Kabupaten Brebes di ruas – ruas jalan Kabupaten – Lokal, dengan dibantu oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan langsung dari APBN maupun Dana Bantuan Keuangan (BanGub) dari Provinsi Jawa Tengah;
2. Untuk menyasati keterbatasan anggaran untuk mengaplikasikan teknologi perhubungan di Kabupaten Brebes, maka Dinas Perhubungan mencoba menyusun skala prioritas penerapan teknologi, dengan harapan pengadaannya dapat dilaksanakan bertahap dengan tujuan akhir tetap untuk memenuhi target kinerja Lalu Lintas dan Kinerja Keselamatan Lalu Lintas melayani masyarakat Kabupaten Brebes. Hal-hal yang sudah diaplikasikan dengan teknologi perhubungan sejauh ini antara lain adalah:
 - a. Instalasi controller multi phase pada beberapa Traffic Light;
 - b. Instalasi countdown timer pada beberapa Traffic Light;
 - c. Instalasi Traffic IP Camera pada beberapa lokasi;
 - d. Penyediaan Hot Spot / Wi-Fi area pada beberapa lokasi;
 - e. Media centre pada periode waktu angkutan lebaran.
3. Luasnya wilayah Kabupaten Brebes tidak menjadikan halangan bagi Dinas Perhubungan untuk tetap melaksanakan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dengan berbagai upaya untuk mendekatkan pelayanan. Hal-hal yang sudah dilakukan untuk mendekatkan pelayanan adalah sebagai berikut:
 - a. Membagi pelayanan uji kendaraan bermotor kedalam dua wilayah pelayanan, yaitu uji di Kluwut untuk melayani pengujian kendaraan bermotor wilayah tengah dan utara, serta uji di Pagojengan untuk melayani pengujian kendaraan bermotor wilayah selatan;



- b. Membagi pelayanan penyediaan sarana prasarana LLAJ dan tugas bantuan lainnya dibagi kedalam wilayah-wilayah pelayanan yaitu:
 - i. Wilayah Terminal Brebes;
 - ii. Wilayah Terminal Tanjung;
 - iii. Wilayah Terminal Banjarharjo;
 - iv. Wilayah Terminal Larangan;
 - v. Wilayah Terminal Ketanggungan;
 - vi. Wilayah Terminal Jatibarang;
 - vii. Wilayah Terminal Bumiayu;
 - viii. Wilayah Pantauan Sitanggal;
 - ix. Wilayah Pantauan Losari.

Dengan melakukan hal tersebut maka diharapkan walaupun Kabupaten Brebes sangat luas, tetap dapat dilaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan sarana prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan tugas bantuan lainnya.

- c. Membagi pelayanan penyediaan lampu penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Brebes;
4. Melakukan operasi gabungan antara Kepolisian dengan Dinas Perhubungan terkait kendaraan yang bermuatan lebih sehingga jalan tidak rusak;
5. Membuat Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengujian Kendaraan Bermotor sehingga memudahkan dalam pelayanan kepada masyarakat terutama kendaraan yang mau Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
6. Melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas seiring pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding lurus dengan pertumbuhan prasarana jalan;



BAB III

PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah suatu bentuk dari kesenjangan antara kondisi yang seharusnya terjadi secara ideal dengan kondisi yang terjadi secara sesungguhnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Berikut ini adalah beberapa permasalahan menonjol yang timbul dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes:

- a. Dalam proses pelaporan pekerjaan sangat sulit untuk mendapat *progress report* secara *real-time* dari masing-masing pengampu kegiatan di tiap Bidang. Hal ini disebabkan karena kontrol yang sangat lemah dari masing-masing seksi kepada pelaksana kegiatan baik untuk kegiatan yang sifatnya Penyedia maupun yang sifatnya swakelola. Hal ini menyulitkan sehingga dalam membuat laporan bulanan terkadang capaian realisasi fisik tidak dapat diketahui secara pasti, walaupun capaian realisasi keuangan dapat diketahui dari catatan keuangan.
- b. Kegiatan yang berjalan terkadang tidak sesuai dengan jadwal anggaran kas yang telah ditentukan. Hal ini membuat kesulitan manakala terjadi penumpukan penyerapan APBD pada triwulan akhir, sehingga banyak terjadi penumpukan pekerjaan.
- c. Pendataan terhadap aset Dinas Perhubungan secara utuh dan pengarsipan kepegawaian dalam bentuk pengolahan data secara elektronik masih belum dapat diwujudkan. Hal ini mengakibatkan kinerja tidak efisien dari segi waktu, karena pengarsipan masih dilakukan secara manual sehingga aksesibilitas terhadap data belum optimal.
- d. Belum adanya sistem pengolahan data secara elektronik untuk mengarsip data kepemilikan dan rekomendasi perizinan angkutan umum, sehingga pelayanan terhadap pemberian izin insidental dan rekomendasi perpanjangan trayek sampai dengan verifikasi perizinan harus dilakukan secara manual dan sangat tidak efisien dari segi waktu.
- e. Kondisi terminal angkutan umum yang merupakan asset Pemerintah Kabupaten Brebes yang dikelola oleh Dinas Perhubungan juga belum representatif untuk melayani masyarakat, dikarenakan kondisinya belum memenuhi standar Terminal yang disyaratkan oleh Kementerian Perhubungan.



- f. Masih kurangnya ketersediaan angkutan penyeberangan, sehingga kebutuhan masyarakat Kabupaten Brebes akan ketersediaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan masih belum dapat terpenuhi secara optimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan terhadap anggaran dan kekurangan jumlah SDM untuk melakukan pengelolaan dan perencanaan.
- g. Bahwa pelayanan pengujian kendaraan bermotor belum memiliki sistem yang terkomputerisasi dengan baik, sehingga antara proses uji, proses administrasi uji dan proses verifikasi perizinan terkait proses pengujian kendaraan bermotor belum terpadu, masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga menyulitkan ketika dibutuhkan pelayanan uji kendaraan yang cepat dan pelaporan data dalam waktu singkat.
- h. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia Penguji Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Kementerian Perhubungan Kabupaten Brebes.
- i. Alat pengujian kendaraan bermotor yang sudah berumur lebih dari 15 Tahun sehingga perlu pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor untuk memudahkan pelayanan yang cepat kepada masyarakat yang akan uji berkala kendaraan bermotor.
- j. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas seperti terminal, dermaga, penyeberangan, penyediaan lampu penerangan jalan, halte, rambu – rambu sungai, rambu – rambu lalu lintas, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sarana angkutan penyeberangan sehingga kebutuhan masyarakat Kabupaten Brebes masih belum dapat terpenuhi secara optimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan terhadap anggaran dan kekurangan jumlah SDM untuk melakukan pengelolaan dan perencanaan.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, dimanatkan bahwa Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Peraturan Bupati Brebes nomor 18 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes tahun 2023 -2026 ditetapkan tanggal 14 maret 2022 .dari peraturan bupati nomor 18 tahun 2022 disebutkan Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 4 (empat) tahun, merupakan penjabaran dari visi dan misi RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan



Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah. RPD Tahun 2023-2026 merupakan tahap keempat RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025. RPD Tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, yang digunakan sebagai Pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, serta sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah Berikut ini adalah uraian Visi Misi Kepala Daerah / Bupati Brebes sesuai RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 :

A. Visi Kepala Daerah /Bupati Brebes adalah :

Brebes yang Madani, Maju, dan Sejahtera

B. Misi untuk mewujudkan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal;
2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif;
4. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
5. Mewujudkan peningkatkan dan pemerataan pembangunan prasarana dan sarana daerah;
6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Dari keenam misi diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes dengan Tugas dan Fungsinya untuk mensukseskan Program Kepala Daerah/ Bupati Brebes di dalam beberapa misi yaitu:

1. misi ke 3 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif
Tujuan RPJPD :Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik, Demokratis, Dan Partisipatif
indikator Tujuan RPJPD : Indeks Reformasi Birokrasi
Tujuan SKPD: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel serta inovatif
indikator Tujuan SKPD Indeks Kepuasan Masyarakat ;



2. misi ke 4 mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Maju Dan Berdaya Saing Berbasis Pada Potensi Keunggulan Lokal

Tujuan RPJPD :Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang Maju Dan Berdaya Saing Berbasis Pada Potensi Keunggulan Lokal

indikator Tujuan RPJPD : Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan SKPD: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan sesuai standar pelayanan

indikator Tujuan SKPD: Kinerja Lalu Lintas, Kinerja Keselamatan Lalu Lintas

Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Indikatornya akan dijabarkan lebih rinci selanjutnya di renstra PD ini.

Ada beberapa Faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi RPJMD sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat:

- a. Tata kelola angkutan umum dan jaringannya belum maksimal
- b. Masih kurangnya kesadaran pemilik/pengusaha angkutan untuk menguji kelayakan kendaraannya
- c. Belum adanya studi dan Kajian terkait Database terkini mengenai Kebutuhan Prasarana Jalan dan Perlengkapan Jalan
- d. Masih minimnya Sarana Operasional untuk Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Analisis Dampak Lalu Lintas/Andalalin

2. Faktor Pendorong:

- a. Telah beroperasinya jalan lingkar utara Brebes-Tegal yang dapat mengurangi beban jalan dalam kota Brebes

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 kemudian di Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

Didasarkan pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020 - 2024, yakni untuk mewujudkan Indonesia yang berpenghasilan MenengahTinggi yang Sejahtera,



Adii dan Berkesinambungan, maka untuk mendukung Visi Presiden 2020 - 2024 guna menjalankan

agenda pembangunan dimaksud, ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

Visi Misi Kementerian Perhubungan:

Visi :

“Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Penjabaran Visi Kementerian Perhubungan dapat dimaknai sebagai berikut:

Konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Konektivitas nasional adalah terhubungannya antar wilayah di seluruh nusantara, termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara.

Handal berarti tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air.

Berdaya saing berarti tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing internasional.

Nilai tambah berarti penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.

Pembangunan transportasi nasional merupakan salah satu strategi kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif antar wilayah. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya Visi Kementerian Perhubungan guna mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah, ditetapkan Misi Kementerian Perhubungan, sebagai berikut:

Kementerian Perhubungan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 dengan uraian sebagai berikut:



1. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi bencana;
3. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;
4. melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan tahun 2020 - 2024 disusun sebagai indikator outcome dan bukan merupakan indikator output. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. meningkatnya rasio konektivitas nasional menjadi 0,763 pada tahun 2024;
2. meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan diindikasikan dengan:
 - a. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi sebesar 88,5 pada tahun 2024;
 - b. capaian on time Performance (OTP) layanan transportasi sebesar 82,08% pada tahun 2024.
3. meningkatnya keselamatan transportasi yang diukur dengan rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan sebesar 23,71 pada tahun 2024.

Sementara itu telaah Rencana strategis/ Renstra Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dengan Visi Kepala Daerah Jawa Tengah 2018-2023 “Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera. (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” dimana Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah melakukan pemantapan system transportasi yang berorientasi pada



konektifitas antar kawasan sehingga memudahkan mobilitas orang/barang dengan aman, selamat dan terjangkau sesuai kemampuan masyarakat membayar pelayanan transportasi. dengan Misi :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub rukun untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan gubernur No. 69 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terdapat program kerja Kepala Daerah yang difokuskan pada sektor transportasi yaitu pada program kerja Ke-7 “Pengembangan Transportasi Massal, Revitalisasi Jalur Kereta Dan Bandara Serta Pembangunan Embung/Irigasi”.

Sejalan dengan misi mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas perhubungan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Forum LLAJ, Pemilihan Kabupaten/Kota dengan system Manajemen LLAJ terbaik melalui lomba Wahana Tata Nugraha, Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas pada Jalan Provinsi di Kab/Kota Jawa Tengah, Penilaian Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kab/Kota, Fasilitasi penyelenggaraan angkutan perbatasan, Sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP), dan Sosialisasi keselamatan angkutan perairan darat dan lautan,

Sedangkan pada misi Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memberikan kontribusi dengan melakukan pengembangan / pelayanan angkutan massal BRT Trans Jateng di Wilayah Kedungsepur Koridor I Semarang-Bawen, II Semarang-Kendal, III Semarang-Demak, dan Wilayah Barlingmascakeb Koridor I Purwokerto-Purbalingga melalui kegiatan peningkatan pelayanan Angkutan Aglomerasi Trans Jateng.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis



Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam pembangunan di Daerah dan mewujudkan manfaat penataan ruang yang berkelanjutan dan berkeadilan, untuk memenuhi asas manfaat, mengakomodir dinamika pembangunan, dan pengembangan wilayah Kabupaten Brebes diperlukan Rencana Tata Ruang yang menjaga keserasian pembangunan wilayah dan sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang ada dalam wilayah Kabupaten Brebes, dengan adanya perkembangan khususnya terkait dengan kebijakan penataan ruang Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, dinamika pembangunan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Brebes adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Strategi kebijakan rencana struktur ruang melalui peningkatan prasarana utama, serta mewujudkan keterpaduan antarwilayah di kabupaten dan antarwilayah kabupaten dengan wilayah lain dengan mengembangkan jaringan jalan dan rel



sebagai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sistem jaringan transportasi untuk mewujudkan keterpaduan pelayanan sistem transportasi;

Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Rencana sistem jaringan transportasi meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi laut.

Rencana sistem jaringan transportasi darat meliputi:

- a. sistem jaringan jalan; dan
- b. sistem jaringan kereta api.

Sistem jaringan jalan meliputi:

- a. jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten;
- b. jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
- c. jaringan jalan kabupaten yang menjadi kewenangan kabupaten;
- d. pengembangan jalan desa;
- e. pengembangan jalan khusus;
- f. terminal penumpang;
- g. terminal barang; dan/atau
- h. jembatan timbang.

Jaringan jalan kabupaten yang menjadi kewenangan kabupaten meliputi:

- a. jalan kolektor primer empat (JKP-4) yang menghubungkan antar - ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan, meliputi:
 1. peningkatan ruas jalan Brebes - Jatibarang; dan
 2. peningkatan ruas jalan kolektor primer empat (JKP) 4 lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
- b. jalan lokal primer, meliputi:
 1. seluruh ruas jalan Kabupaten yang tidak termasuk dalam jalan kolektor primer empat (JKP) 4 dan jalan strategis kabupaten yang termuat dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini; dan
 2. pengembangan ruas jalan lokal primer lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
- c. Jalan strategis kabupaten yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan kabupaten, meliputi:



1. pengembangan ruas jalan Limbangan Wetan - Randusanga Kulon;
2. pengembangan ruas jalan Randusanga Kulon - pantai;
3. pengembangan ruas jalan Klampok - Sawojajar;
4. pengembangan ruas jalan Sawojajar - Pandansari;
5. pengembangan ruas jalan Terlangu - Kalipucang;
6. pengembangan ruas jalan Cikakak - Cibendung;
7. pengembangan ruas jalan Cikakak - Banjarharjo;
8. pengembangan ruas jalan Kretek - Kaligua;
9. pengembangan ruas jalan Brebes - Sigempol;
10. pengembangan ruas jalan Bulakamba - Pulolampes;
11. pengembangan ruas jalan Ahmad Dahlan;
12. pengembangan ruas jalan Hasyim Asyari;
13. pengembangan ruas jalan poros tengah (ruas Jalan Klampok - Sitanggal, Sitanggal - Larangan, Larangan - Pamulihan, Pamulihan - Jemasih, Jemasih - Bangbayang);
14. pengembangan ruas jalan Pamulihan - Wlahar;
15. pengembangan ruas jalan Talok - Maribaya;
16. pengembangan ruas jalan lingkaran industri Brebes - Tegal (ruas Kecipir - Blangko - Klampok); dan
17. pengembangan ruas jalan strategis lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Brebes nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Bupati membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain :

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.



Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan wilayah. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL – UPL sesuai Peraturan Bupati nomor 94 tahun 2017 adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang tidak terdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan /atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL – UPL

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas. Dokumen analisis dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Terkait dengan hal tersebut, berikut ini adalah isu – isu strategis yang diangkat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes antara lain :

- A. Manajemen Rekayasa Lalu lintas dan Inspeksi Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten ;



- B. Angkutan Umum dan pembaruan Trayek serta digitalisasi Uji Kendaraan Bermotor juga pemenuhan Standarisasi kelayakan Alat Uji Kendaraan Bermotor;
- C. Penyediaan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Penerangan Jalan/ Penerangan Jalan Umum, dan Alat Pengendali Pengaman Pengguna Jalan dan Lainnya untuk mendukung Kinerja Keselamatan Lalu Lintas;



BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan apa yang akan dihasilkan dalam kurun waktu periode perencanaan, dalam hal ini untuk jangka waktu lima tahun (2023-2026). Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
					2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif									
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	81	81.5	82,00	82.50	83,00	83.
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah								
			Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Perhubungan	Skor	81	81.5	82,00	82.50	83,00
Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Perhubungan Sesuai Standar Pelayanan									
		Kinerja Lalu Lintas	Skor	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Menjaga Tingkat Pelayanan Ruas Jalan								
		Terjaganya Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	Skor	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi								



Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
					2023	2024	2025	2026	
		Persentase Pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	63	64	65	66	67	67
	Meningkatnya Jumlah Ketersediaan Prasarana Jalan	Persentase Pemenuhan Jumlah Prasarana Jalan	%	52	53	54	55	56	56



BAB V.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk dapat mencapai tujuan yang akan dicapai, diperlukan strategi yang tepat. Strategi tersebut dituangkan dalam bentuk arah kebijakan yang mempertimbangkan faktor pendorong, penghambat dan sumber daya yang dimiliki. Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes akan menerapkan strategi dan arah kebijakan seperti yang tersusun dalam Tabel 5.1

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur melalui kursus, diklat, inhouse training2. Penggunaan Teknologi Informasi dalam administrasi dan pelayanan masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kompetensi aparatur sesuai kompetensi dan spesialisasinya melalui kursus, diklat dan sebagainya2. Mendorong penggunaan aplikasi dan teknologi informasi, khususnya di bagian yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.



Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Perhubungan Sesuai Standar Pelayanan	Menjaga Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan penggunaan teknologi informasi pada rekayasa lalu lintas 2. Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam manajemen rekayasa lalu lintas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Area Traffic Management System 2. Memaksimalkan koordinasi dengan instansi terkait melalui forum LLAJ (traffic board)
	Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan fasilitas dan alat pengujian kendaraan bermotor 2. Sosialisasi kewajiban uji kendaraan bagi angkutan umum dan penumpang 3. Penegakan hukum terhadap kelayakan kendaraan umum yang beroperasi di jalan raya, bekerja sama dengan instansi terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kecepatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor melalui system informasi pengujian yang terintegrasi dari pendaftaran sampai dengan hasil uji 2. Bekerjasama dengan instansi terkait baik pemerintah maupun swasta dalam sosialisasi dan penegakan hukum kendaraan wajib uji
	Meningkatnya Jumlah Ketersediaan Prasarana Jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan prasarana dan perlengkapan jalan 2. Penggunaan teknologi yang lebih baik dan ramah lingkungan. 3. Menyediakan database prasarana jalan yang lengkap dan terintegrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong penggunaan lampu LED dan tenaga surya untuk Penerangan Jalan Umum 2. Mendorong meterisasi tagihan listrik Penerangan Jalan Umum 3. Menyusun database Prasarana dan Perlengkapan Jalan yang lengkap dan akurat.



BAB VI.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 – TAHUN 2026

Tabel 6.1. Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	SUB kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2022 - 2026										PD Penanggung Jawab	Lokasi				
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Perhubungan									81,00		81,50		82,00		82,50		83,00							
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	"1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perkantoran SKPD Dinas Perhubungan(%)"						81,00		81,50	18.720.000,00	82,00	21.265.000,000	82,50	21.355.000,000	83,00	21.275.000,000						DI N H U B



Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	SUB kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2022 - 2026										PD Penanggung Jawab	Lokasi			
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Dokumen Perencanaan, Penganggaran, pengendalian dan evaluasi				7,00		7,00	340.000.000	7,00	340.000.000	7,00	340.000.000	7,00	350.000.000					DI NH UB
									Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1,00		1,00	180.000.000	1,00	180.000.000	1,00	180.000.000	1,00	190.000.000					DI NH UB
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1,00		1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000					DI NH UB
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1,00		1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000					DI NH UB
									Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1,00		1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000					DI NH UB



Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	SUB kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2022 - 2026										PD Penanggung Jawab	Lokasi			
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
									Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1,00		1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000					DI NH UB
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1,00		1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000					DI NH UB
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1,00		1,00	60.000.000	1,00	60.000.000	1,00	60.000.000	1,00	60.000.000					DI NH UB
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Rasio implementasi pelaksanaan Administrasi Keuangan				6,00		6,00	6.890.000.000	6,00	6.940.000.000	6,00	6.940.000.000	6,00	6.940.000.000					DI NH UB
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		57,00		57,00	6.000.000.000	57,00	6.000.000.000	57,00	6.000.000.000	57,00	6.000.000.000					DI NH UB



Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	SUB kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2022 - 2026										PD Penanggung Jawab	Lokasi		
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
									Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		2,00		2,00	100.000.000	2,00	100.000.000	2,00	100.000.000	2,00	100.000.000				DI NH UB
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2,00		2,00	700.000.000	2,00	750.000.000	2,00	750.000.000	2,00	750.000.000				DI NH UB
									Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12,00		12,00	20.000.000	12,00	20.000.000	12,00	20.000.000	12,00	20.000.000				DI NH UB
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1,00		1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000				DI NH UB
									Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1. Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1,00		1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000				DI NH UB



Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	SUB kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2022 - 2026										PD Penanggung Jawab	Lokasi			
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4,00		4,00	30.000.000	4,00	30.000.000	4,00	30.000.000	4,00	30.000.000					DI NH UB
									Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1. Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1,00		1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000					DI NH UB
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Persentase BMD SKPD dalam kondisi baik				66,00		67,00	60.000.000	68,00	60.000.000	69,00	150.000.000	70,00	60.000.000					DI NH UB
									Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1. Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0,00		1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000					DI NH UB
									Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1,00		1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000					DI NH UB



Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	SUB kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2022 - 2026										PD Penanggung Jawab	Lokasi			
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
									Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1. Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1,00		1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000			DI NH UB
									Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		2,00		2,00	10.000.000	2,00	10.000.000	2,00	10.000.000	2,00	10.000.000			DI NH UB		
									Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1,00		1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000			DI NH UB		
									Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1,00		1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000			DI NH UB		
									Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1. Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1,00		1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000			DI NH UB		



Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	SUB kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2022 - 2026										PD Penanggung Jawab	Lokasi		
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
							Admistrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Peranngkat Daerah	1. Target Pendapatan Retribusi Dinas Perhubungan				72,00		73,00	70.000.000	74,00	70.000.000	75,00	160.000.000	76,00	160.000.000				DI NH UB
									Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	1. Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		1,00		1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000				DI NH UB
									Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	1. Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		1,00		1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000				DI NH UB
									Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1. Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		2,00		2,00	10.000.000	2,00	10.000.000	2,00	10.000.000	2,00	10.000.000				DI NH UB
									Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1. Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		1,00		1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000				DI NH UB
									Pengolahan Data Retribusi Daerah	1. Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data		0,00		2,00	10.000.000	2,00	10.000.000	2,00	10.000.000	2,00	10.000.000				DI NH UB



Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	SUB kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2022 - 2026										PD Penanggung Jawab	Lokasi					
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
										Retribusi Daerah																		
										Penetapan Wajib Retribusi Daerah	1. Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah		1,00		1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000				DI NH UB
										Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1. Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		1,00		1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000				DI NH UB
							Administrasi Kepegawaian Peranekat Daerah	1. Meningkatkan Kompetensi dan Kapasitas ASN					74,00		76,00	660.000.000	77,00	660.000.000	78,00	660.000.000	79,00	660.000.000						DI NH UB
										Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1. Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		2,00		2,00	20.000.000	2,00	20.000.000	2,00	20.000.000	2,00	20.000.000						DI NH UB
										Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		300,00		300,00	400.000.000	300,00	400.000.000	300,00	400.000.000	300,00	400.000.000						DI NH UB
										Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1,00		1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000						DI NH UB



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	SUB kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2022 - 2026										PD Penanggung Jawab	Lokasi		
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
									Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1,00		1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000				DI NH UB
									Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1,00		1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000				DI NH UB
									Pemulangan Pegawai yang Pensiun	1. Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan		3,00		3,00	20.000.000	3,00	20.000.000	3,00	20.000.000	3,00	20.000.000				DI NH UB
									Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1. Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		1,00		1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000				DI NH UB
									Pemindahan Tugas ASN	1. Jumlah ASN yang dipindahtugaskan		0,00		0,00	20.000.000	0,00	20.000.000	0,00	20.000.000	0,00	20.000.000				DI NH UB
									Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5,00		5,00	50.000.000	5,00	50.000.000	5,00	50.000.000	5,00	50.000.000				DI NH UB
									Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		20,00		20,00	25.000.000	20,00	25.000.000	20,00	25.000.000	20,00	25.000.000				DI NH UB



Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	SUB kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2022 - 2026										PD Penanggung Jawab	Lokasi			
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
									Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		5,00		5,00	45.000.000	5,00	45.000.000	5,00	45.000.000	5,00	45.000.000					DI NH UB
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase Layanan Administrasi umum dengan baik		82,00		83,00	2.290.000.000	84,00	2.290.000.000	85,00	2.290.000.000	86,00	2.290.000.000					DI NH UB
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5,00		5,00	30.000.000	5,00	30.000.000	5,00	30.000.000	5,00	30.000.000					DI NH UB
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5,00		5,00	400.000.000	5,00	400.000.000	5,00	400.000.000	5,00	400.000.000					DI NH UB
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		5,00		5,00	220.000.000	5,00	220.000.000	5,00	220.000.000	5,00	220.000.000					DI NH UB
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		5,00		5,00	400.000.000	5,00	400.000.000	5,00	400.000.000	5,00	400.000.000					DI NH UB
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang		5,00		5,00	200.000.000	5,00	200.000.000	5,00	200.000.000	5,00	200.000.000					DI NH UB



Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	SUB kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2022 - 2026										PD Penanggung Jawab	Lokasi			
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
										Disediakan																
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan		5,00		5,00	100.000.000	5,00	100.000.000	5,00	100.000.000	5,00	100.000.000					DI NH UB
									Penyediaan Bahan/Material	1. Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		5,00		5,00	50.000.000	5,00	50.000.000	5,00	50.000.000	5,00	50.000.000					DI NH UB
									Fasilitas Kunjungan Tamu	1. Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1,00		1,00	120.000.000	1,00	120.000.000	1,00	120.000.000	1,00	120.000.000					DI NH UB
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1,00		1,00	700.000.000	1,00	700.000.000	1,00	700.000.000	1,00	700.000.000					DI NH UB
									Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1,00		1,00	30.000.000	1,00	30.000.000	1,00	30.000.000	1,00	30.000.000					DI NH UB
									Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1,00		1,00	40.000.000	1,00	40.000.000	1,00	40.000.000	1,00	40.000.000					DI NH UB
																										DI NH UB



Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	SUB kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2022 - 2026										PD Penanggung Jawab	Lokasi		
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) baru yang masuk dalam BMD SKPD				14,00		14,00	1.035.000.000	14,00	3.530.000.000	14,00	3.430.000.000	14,00	3.430.000.000				DI NH UB
									Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1,00		1,00	400.000.000	1,00	400.000.000	1,00	400.000.000	1,00	400.000.000				DI NH UB
									Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1,00		1,00	300.000.000	2,00	1.300.000.000	14,00	2.800.000.000	5,00	2.800.000.000				DI NH UB
									Pengadaan Alat Besar	1. Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		0,00		3,00	5.500.000.000	3,00	4.000.000.000	2,00	4.000.000.000	1,00	1.000.000.000				DI NH UB
									Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1. Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan		0,00		1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000				DI NH UB
									Pengadaan Mebel	1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1,00		10,00	100.000.000	10,00	100.000.000	10,00	100.000.000	10,00	100.000.000				DI NH UB



Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	SUB kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2022 - 2026										PD Penanggung Jawab	Lokasi			
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0,00		3,00	135.000.000	1,00	330.000.000	0,00	30.000.000	0,00	30.000.000					DI NH UB
									Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0,00		0,00	0	0,00	1.300.000.000	0,00	0	0,00	0					DI NH UB
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		3,00		3,00	50.000.000	3,00	50.000.000	3,00	50.000.000	3,00	50.000.000					DI NH UB
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0,00		2,00	300.000.000	2,00	300.000.000	2,00	300.000.000	2,00	300.000.000					DI NH UB
																										DI NH UB
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Persentas Pemenuhan Jasa Penunjang kondisi baik		81,00		82,00	1.355.000.000	83,00	1.355.000.000	84,00	1.365.000.000	85,00	1.365.000.000					DI NH UB



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	SUB kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2022 - 2026										PD Penanggung Jawab	Lokasi			
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
									Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12,00		12,00	95.000.000	12,00	95.000.000	12,00	100.000.000	12,00	100.000.000					DI NH UB
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12,00		12,00	940.000.000	12,00	940.000.000	12,00	940.000.000	12,00	940.000.000					DI NH UB
									Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12,00		12,00	90.000.000	12,00	90.000.000	12,00	90.000.000	12,00	90.000.000					DI NH UB
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12,00		12,00	230.000.000	12,00	230.000.000	12,00	235.000.000	12,00	235.000.000					DI NH UB
																										DI NH UB
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Persentase BMD SKPD dalam kondisi baik		80,00		82,00	6.020.000.000	83,00	6.020.000.000	84,00	6.020.000.000	85,00	6.020.000.000					DI NH UB



Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	SUB kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2022 - 2026										PD Penanggung Jawab	Lokasi		
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
									Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1. Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		0,00		2,00	200.000.000	2,00	200.000.000	2,00	200.000.000	2,00	200.000.000				DI NH UB
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0,00		3,00	200.000.000	3,00	200.000.000	3,00	200.000.000	3,00	200.000.000				DI NH UB
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0,00		2,00	400.000.000	2,00	400.000.000	2,00	400.000.000	2,00	400.000.000				DI NH UB
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0,00		2,00	200.000.000	2,00	200.000.000	2,00	200.000.000	2,00	200.000.000				DI NH UB
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	1. Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi		0,00		1,00	20.000.000	1,00	0	0,00	20.000.000	0,00	0				DI NH UB
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	SUB kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2022 - 2026										PD Penanggung Jawab	Lokasi		
												2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra								



Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	SUB kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2022 - 2026												PD Penanggung Jawab	Lokasi			
												2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD						
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
																										PD		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Perhubungan Sesuai Standar Pelayanan	Kinerja Lalu Lintas	Menjaga Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	Terjaganya Tingkat Pelayanan Ruas Jalan									0,70		0,70		0,70		0,70										
					PROGRAM PENYELANGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	. Laporan Kegiatan Analisis Kinerja Ruas Jalan(dokumen)						6,00		6,00	6.025.000.000	6,00	6.025.000.000	6,00	6.025.000.000	6,00	6.025.000.000							DI NH UB
						Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1. Dokumen Rencana Induk Transportasi					0,00		1,00	350.000.000	0,00	350.000.000	0,00	350.000.000	0,00	350.000.000							DI NH UB
						Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					6,00		6,00	350.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0							DI NH UB



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	SUB kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2022 - 2026										PD Penanggung Jawab	Lokasi			
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
									Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		0,00		0,00	0	6,00	150.000.000	0,00	0	0,00	0					DI NH UB
									Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1. Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		0,00		0,00	0	0,00	0	6,00	50.000.000	6,00	50.000.000					DI NH UB
									Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1. Terselenggaranya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		0,00		1,00	0	1,00	0	1,00	0	1,00	0					DI NH UB
									Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam	1. Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha		0,00		1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000					DI NH UB



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	SUB kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2022 - 2026										PD Penanggung Jawab	Lokasi		
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
									Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terintegrasi Secara Elektronik															
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota		0,00		6,00	50.000.000	6,00	50.000.000	6,00	50.000.000	6,00	50.000.000				DI NH UB
							Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1. Laporan Kegiatan Monitoring dan Supervisi Lalu Lintas				12,00		12,00	1.500.000.000	12,00	1.500.000.000	12,00	1.500.000.000	12,00	1.500.000.000				DI NH UB



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	SUB kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2022 - 2026										PD Penanggung Jawab	Lokasi			
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
									Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		6,00		6,00	500.000.000	6,00	500.000.000	6,00	500.000.000	6,00	500.000.000					DI NH UB
									Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		6,00		6,00	1.000.000.000	6,00	1.000.000.000	6,00	1.000.000.000	6,00	1.000.000.000					DI NH UB
									Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		0,00		2,00	50.000.000	2,00	50.000.000	2,00	50.000.000	2,00	50.000.000					DI NH UB
							Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	1. Dokumen Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)				12,00		12,00	650.000.000	12,00	650.000.000	12,00	650.000.000	12,00	650.000.000					DI NH UB
									Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	1. Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan		0,00		1,00	150.000.000	0,00	0	9,00	0	1,00	150.000.000					DI NH UB



Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	SUB kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2022 - 2026										PD Penanggung Jawab	Lokasi			
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
									Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	1. Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0,00		2,00	50.000.000	2,00	50.000.000	2,00	50.000.000	2,00	50.000.000					DI NH UB
									Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1. Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		6,00		6,00	150.000.000	6,00	150.000.000	6,00	150.000.000	6,00	150.000.000					DI NH UB
									Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	1. Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi		2,00		2,00	500.000.000	2,00	500.000.000	2,00	500.000.000	2,00	500.000.000					DI NH UB
									Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1. Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ		6,00		6,00	3.525.000.000	6,00	3.525.000.000	6,00	3.525.000.000	6,00	3.525.000.000					DI NH UB
									Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	1. Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0,00		2,00	400.000.000	2,00	400.000.000	2,00	400.000.000	2,00	400.000.000					DI NH UB
										2. Laporan Survey penataan penggunaan ruang milik jalan		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00						DI NH UB
										3. Laporan Survey Identifikasi Anatomi Lalulintas		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00						DI NH UB
									Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan	1. Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan		12,00		12,00	3.125.000.000	12,00	3.125.000.000	12,00	3.125.000.000	12,00	3.125.000.000					DI NH UB



Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	SUB kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2022 - 2026										PD Penanggung Jawab	Lokasi		
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
									an Terminal	Terminal															
										2. Laporan Survey identifikasi kebutuhan perlengkapan jalan		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00					DI NH UB
										3. Laporan Survey Operasional Angkutan Penumpang dan Barang		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00					DI NH UB
	Kinerja Keselamatan Lalu Lintas	Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi	Persentase Pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi									63,00		64,00		65,00		66,00		67,00					
					PROGRAM PENYELANGGARAAN PELAYANAN ANGKUTAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG BAIK (%)	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor yang baik (%)						68,00		70,00	2.870.000,00	72,00	3.620.000,00	74,00	3.220.000,00	76,00	2.720.000,00				DI NH UB
							Pengelolaan Terminal Penuangan Tipe C	1. Terselenggaranya Pelayanan Terminal Penuangan Tipe C				12,00		12,00	650.000,00	12,00	1.150.000,00	12,00	1.050.000,00	12,00	550.000,00				DI NH UB



Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	SUB kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2022 - 2026										PD Penanggung Jawab	Lokasi			
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
									Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	1. Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun		0,00		1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	0,00	0	0,00	0					DI N H U B
									Pembangunan Gedung Terminal	1. Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun		0,00		0,00	0	1,00	500.000.000	1,00	500.000.000	0,00	0					DI N H U B
									Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan		0,00		3,00	300.000.000	3,00	300.000.000	3,00	300.000.000	3,00	300.000.000					DI N H U B
									Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	1. Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara		1,00		1,00	200.000.000	1,00	200.000.000	1,00	200.000.000	1,00	200.000.000					DI N H U B
									Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	1. Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya		35,00		35,00	50.000.000	35,00	50.000.000	35,00	50.000.000	35,00	50.000.000					DI N H U B
									Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1. Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan Uji		5.000,00		5.000,00	1.820.000.000	5.000,00	1.970.000.000	5.000,00	1.820.000.000	5.000,00	1.820.000.000					DI N H U B



Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	SUB kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2022 - 2026										PD Penanggung Jawab	Lokasi						
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD					
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp				
									Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		2,00		2,00	500.000.000	2,00	500.000.000	2,00	500.000.000	2,00	500.000.000								DI NH UB
									Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1. Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya		6,00		5,00	300.000.000	5,00	300.000.000	5,00	300.000.000	5,00	300.000.000								DI NH UB
									Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1. Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar		450,00		450,00	50.000.000	450,00	50.000.000	450,00	50.000.000	450,00	50.000.000								DI NH UB
									Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1. Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		2,00		2,00	150.000.000	2,00	150.000.000	2,00	150.000.000	2,00	150.000.000								DI NH UB
									Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1. Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		0,00		12,00	70.000.000	12,00	70.000.000	12,00	70.000.000	12,00	70.000.000								DI NH UB
									Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1. Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		0,00		12,00	200.000.000	12,00	200.000.000	12,00	200.000.000	12,00	200.000.000								DI NH UB



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	SUB kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2022 - 2026										PD Penanggung Jawab	Lokasi			
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
									Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		20,00		20,00	200.000.000	20,00	200.000.000	20,00	200.000.000	20,00	200.000.000					DI NH UB
									Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1. Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		10,00		10,00	50.000.000	10,00	50.000.000	10,00	50.000.000	10,00	50.000.000					DI NH UB
									Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1. Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		0,00		0,00	0	1,00	150.000.000	0,00	0	0,00	0					DI NH UB
									Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		12,00		12,00	500.000.000	12,00	500.000.000	12,00	500.000.000	12,00	500.000.000					DI NH UB
									Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota	1. Rasio Angkutan Pedesaan yang berkeselamatan bersih dan nyaman tepat waktu		29,00		31,00	300.000.000	33,00	300.000.000	35,00	300.000.000	37,00	300.000.000					DI NH UB



Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	SUB kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2022 - 2026												PD Penanggung Jawab	Lokasi			
												2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD						
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
							dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																					
									Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia		0,00		44,00	100.000.000	44,00	100.000.000	44,00	100.000.000	44,00	100.000.000							DI NH UB
									Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1. Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota		12,00		12,00	200.000.000	12,00	200.000.000	12,00	200.000.000	12,00	200.000.000							DI NH UB



Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	SUB kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2022 - 2026										PD Penanggung Jawab	Lokasi				
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
							Penetapan Kawasan Perkotaaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Mela mpaui Batas I (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam I (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1. dokume n penetapan rute perbatas an					0,00		0,00	0	1,00	100.000.000	0,00	50.000.000	0,00	50.000.000					DI NH UB
									Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1. Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota			0,00		0,00	0	1,00	100.000.000	0,00	0	0,00	0					DI NH UB



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	SUB kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2022 - 2026										PD Penanggung Jawab	Lokasi		
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
									Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		0,00		0,00	0	1,00	0	0,00	50.000.000	0,00	50.000.000				DI NH UB
							Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah dokumen Penetapan Tarif Angkutan Orang dan /barang				0,00		1,00	100.000.000	0,00	100.000.000	0	0,00	0					DI NH UB



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	SUB kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2022 - 2026										PD Penanggung Jawab	Lokasi			
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
									Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0,00		0,00	100.000.000	1,00	0	0,00	0	0,00	0				DI NH UB	
									Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0,00		0,00	0	1,00	100.000.000	0,00	0	0,00	0				DI NH UB	
		Meningkatnya Jumlah Keterseediaan Prasarana Jalan	Persentase Pemenuhan Jumlah Prasarana Jalan									52,00		53,00		54,00		55,00		60,00						
					PROGRAM PENYELANGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							52,00		53,00	0	54,00	0	55,00	0	60,00	0					DI NH UB



Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	SUB kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan 2022 - 2026										PD Penanggung Jawab	Lokasi			
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
							Penyediaan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1. Persentase tersedianya Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				52,00		53,00	0	54,00	0	55,00	0	60,00	0					DI NH UB
									Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		0,00		15,00	800.000.000	15,00	1.100.000.000	16,00	1.650.000.000	15,00	1.650.000.000					DI NH UB
									Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		0,00		1.536,00	4.800.000.000	1.537,00	4.900.000.000	1.536,00	4.800.000.000	1.536,00	4.800.000.000					DI NH UB
									Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	1. Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		0,00		6,00	320.000.000	7,00	370.000.000	8,00	420.000.000	8,00	420.000.000					DI NH UB
									Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	1. Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		9,00		1.042,00	2.050.000.000	1.044,00	2.500.000.000	1.044,00	2.050.000.000	1.044,00	2.050.000.000					DI NH UB



BAB VII.

INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD TAHUN 2023 – TAHUN 2026

Tabel 7.1 Indikator Kinerja

No.	Bidang Urusan / Indikator	Data Capaian (2022)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Kondisi Kinerja Pada Tahun Peralihan (2027)
			2023	2024	2025	2026		
1	Laporan Pelaksanaan Pengendalian Dan Penegakkan Disiplin Lalu Lintas (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
2	Pengadaan Perlengkapan Jalan Portable Pendukung MRLL (Paket)	-	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket
3	Jumlah Paku Jalan (Buah)	-	2.300 Buah	2.300 Buah	2.300 Buah	2.300 Buah	2.300 Buah	2.300 Buah
4	Laporan Kegiatan Pengamanan Hari – Hari Tertentu (Laporan)	-	60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan



No.	Bidang Urusan / Indikator	Data Capaian (2022)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Kondisi Kinerja Pada Tahun Peralihan (2027)
			2023	2024	2025	2026		
5	Penyusunan Kajian Teknis Transportasi (Dokumen)	-	2 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
6	Laporan Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
7	Dokumen Inspeksi Monitoring dan Evaluasi Andalalin (Laporan)	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
8	Peralatan Survey Inspeksi Keselamatan (Paket)	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
9	Pengadaan Kendaraan Operasional Inspeksi, Monitoring Dan Evaluasi (Unit)	-	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	1 Unit
10	Pengadaan Mobil Derek (Unit)	-	0 Unit	1 unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	1 Unit
11	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Inspeksi, Monitoring Dan Evaluasi (Unit)	-	0 Unit	0 Unit	2 Unit	4 Unit	6 Unit	6 Unit
12	Inspeksi Dan Evaluasi Kinerja Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) (Laporan)	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
13	Pembangunan Pos Jaga, Palang Pintu dan Kelengkapannya (unit)	-	-	2 unit	-	-	-	-
14	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan Jalan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan



No.	Bidang Urusan / Indikator	Data Capaian (2022)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Kondisi Kinerja Pada Tahun Peralihan (2027)
			2023	2024	2025	2026		
15	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan Perairan Daratan (Laporan)	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
16	Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Kabupaten (Orang)	-	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang
17	Jumlah Laporan Kinerja Terminal (Laporan)	-	84 Laporan	84 Laporan	84 Laporan	84 Laporan	84 Laporan	84 Laporan
18	Jumlah Laporan Rekapitulasi Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kendaraan/Tahun (Laporan)	8.852 Unit	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
19	Jumlah Laporan Kegiatan Ramp Check Di Terminal (Laporan)	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
20	Jumlah PJU Terpasang (Unit)	1.208	1.500 Unit	1.698 Unit	1.887 Unit	2.075 Unit	2.264 Unit	2.264 Unit
21	Pengadaan dan instalasi Delineator (Unit)	-	1.000 Unit	1.000 Unit	1.000 Unit	1.000 Unit	1.000 Unit	1.000 Unit
22	Panjang Marka Jalan (m2)	393 m2	1.300 m2	1.300 m2	1.300 m2	1.300 m2	1.300 m2	1.300 m2
23	Panjang Pagar Pengaman Jalan Yang Terpasang (meter)	-	1.000 meter	1.000 meter	1.000 meter	1.000 meter	1.000 meter	1.000 meter



No.	Bidang Urusan / Indikator	Data Capaian (2022)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Kondisi Kinerja Pada Tahun Peralihan (2027)
			2023	2024	2025	2026		
24	Jumlah Rambu Lalu Lintas Yang Terpasang (Unit)	634 Unit	300 Unit	300 Unit	300 Unit	300 Unit	300 Unit	300 Unit
25	Jumlah Cermin Di Tikungan Rawan Kecelakaan (Unit)	20 Unit	70 Unit	120 Unit	170 Unit	220 Unit	270 Unit	270 Unit
26	Peningkatan Landasan dan Utilitas Rest Area Angkutan Barang Kecipir (m2)	3.000 m2	3.000 m2	4.500 m2	6.000 m2	7.500 m2	10.000 m2	10.000 m2
27	Pembangunan dan Pengembangan Dermaga (Unit)	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
28	Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Komersial (Unit)	-	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
29	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan LLAJ (Kegiatan)	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
30	Penyuluhan Keselamatan Berlalu Lintas (Orang)	-	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang
31	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ (Orang)	-	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang
32	Jumlah Halte Terbangun (Unit)							



No.	Bidang Urusan / Indikator	Data Capaian (2022)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Kondisi Kinerja Pada Tahun Peralihan (2027)
			2023	2024	2025	2026		
		4 unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	40 Unit
33	Pembangunan Area Traffic Control System (ATCS) (Unit)	-	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
34	Jumlah PJU Yang Terpelihara (Unit)	22.368 Unit	23.450 Unit	24.450 Unit	25.450 Unit	26.450 Unit	27.450 Unit	27.450 Unit
35	Pemeliharaan dan Revitalisasi Traffic Light dan Warning Light serta Peringatan Dini Perlintasan Sebidang (PDPS) (Unit)	-	61 Unit	61 Unit	61 Unit	61 Unit	61 Unit	61 Unit
36	Pemeliharaan dan Pengembangan Pelabuhan dan Dermaga (Lokasi)	-	0 Lokasi	2 Lokasi	4 Lokasi	6 Lokasi	8 Lokasi	8 Lokasi
37	Pemeliharaan Landasan dan Utilitas Rest Area Angkutan Barang Kecipir (m2)	3.000 m2	3.000 m2	3.000 m2	4.500 m2	6.000 m2	8.500 m2	8.500 m2
38	Pemeliharaan Lampu Suar (Buah)	-	6 Buah	6 Buah	6 Buah	6 Buah	6 Buah	6 Buah
39	Pemeliharaan dan Operasional ATCS (Unit)	-	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
40	Pemeliharaan Prasarana Terminal Angkutan Jalan (Terminal)	-	7 Terminal	7 Terminal	7 Terminal	7 Terminal	7 Terminal	7 Terminal



BAB VIII.

PENUTUP

Rencana Strategis atau Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat strategis dan indikatif sehingga masih diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu empat tahun.

Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026 yang disesuaikan dengan pagu indikatif, program kegiatan yang telah ditentukan di RPJPD dan Renstra. Dalam penyusunan Renja akan menjadi acuan / pedoman dalam penentuan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

Selain itu Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes menjadi pedoman untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja serta proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.

Pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes akan menjadi kinerja Dinas untuk pencapaian Visi Misi Kabupaten Brebes tahun 2023 -2026, sehingga setiap target yang akan dicapai perlu dipertimbangkan menyesuaikan dengan target RPD serta pagu indikatif yang ditetapkan.

Perlunya keterlibatan dari *stakeholder* dan masyarakat untuk mendukung, menjaga koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

Brebes, 23 maret 2022
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES

Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si.
Pemhina Utama Muda
NIP. 196802101988031004

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Grinting No. 242 Telp. / Fax (0283) 870435 Brebes – 52253
Website : www.brebeskab.go.id e-mail : dinhubkabbrebes@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES

NOMOR 050 / 0251 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES TAHUN 2023-2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 telah ditetapkan, maka sebagai tindak lanjut Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) empat tahun kedepan yang membuat visi, misi strategis , kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi PD;
 - b. Bahwa agar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026, dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
5. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Instruksi Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 111 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes; dan
8. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perhubungan

Kabupaten Brebes, dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

- PERTAMA** :
1. Melakukan Pembahasan Identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang dimasyarakat;
 2. Melakukan Pembahasan Pengolahan Data dan Informasi, Analisis Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes;
 3. Melakukan Pengkajian Evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes;
 4. Melakukan Penentuan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes;
 5. Melaksanakan Penelaahan Rancangan Awal dan Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes;
 6. Melaksanakan Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes dengan Arah Rencana Pembangunan Kabupaten Brebes;
 7. Melaksanakan Penajaman terhadap Indikator dan Target Kinerja Program dan Kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes;
 8. Melaksanakan Sinkronisasi Program dan Kegiatan dalam rangka Optimalisasi Pencapaian Sasaran sesuai dengan Kewenangan dan Sinergis Pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas;

9. Melaksanakan Penentuan Sasaran dan Kegiatan PD disusun berdasarkan Pendekatan Kinerja Perencanaan dan Penganggaran Terpadu.

KEDUA : Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan Ini.

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Brebes
pada tanggal : 20 Januari 2022


PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES
DINHUB
Des. **BUDHI BARMAWAN, M.Si.**
Pembina Utama Muda

NIP. 19680210 198803 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes
Nomor : 050 / 0251 Tahun 2022
Tanggal : 20 Januari 2022

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023-2026**

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs.BUDHI DARMAWAN, M.Si NIP. 19680210 198803 1 004	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes	Penanggung Jawab
2	UNTUNG RIZALUDIN, SE NIP. 19690924 199403 1 003	Sekretaris Dinas	Ketua
3	M.AMIN RAMSUS, SE NIP. 19820831 201101 1 003	Kepala Sub Bag.Program dan Keuangan	Sekretaris
4	Ir.M. REZA PRISMAN, M.Sc NIP. 19821107 200312 1 004	Kepala Bidang Lalu Lintas	Anggota
5	Drs. IMAM SUGIARTO, M.Pd NIP. 19660716 199901 1 001	Kepala Bidang Angkutan dan Sarana	Anggota
6	DIAN KURNIANTO, S. Sos NIP. 198108132 00604 1 010	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Anggota



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Grinting No. 242 Telp. / Fax (0283) 870435 Brebes – 52253
Website : www.brebeskab.go.id e-mail : dinhubkabbrebes@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES**

NOMOR 050 / 0999 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 – 2026**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 telah ditetapkan, maka sebagai tindak lanjut Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) 4 (empat) tahun kedepan yang memuat visi, misi strategis, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. Bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes, maka perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019(Covid 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
5. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Instruksi Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 111 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes; dan
8. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.

- PERTAMA** : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.
- KETIGA** : Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.
- KEEMPAT** : Sistematis Penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 meliputi:
- a. **BAB I** : **PENDAHULUAN**
Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.
 - b. **BAB II** : **GAMBARAN PERHUBUNGAN**
Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
 - c. **BAB III** : **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
Memuat Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telah Visi dan Misi RPD

Kabupaten Brebes 2023-2026, Telah Renstra
Kementerian dan Renstra Dinas Perhubungan
Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah,
Telah terhadap Rencana Tata Ruang
Wilayah, dan Penentuan Isu-Isu Strategis

- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN
- h. BAB VIII : PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes
pada tanggal : 23 Maret 2022



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES

Drs. BUDI DARMAWAN, M.Si.

Ponema Utama Muda

NIP. 19680210 198803 1 004